

UNIVERSITAS INDONESIA



**PEMBEBASAN INDIVIDU DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN
PAULO FREIRE DAN RELEVANSINYA DENGAN
PENDIDIKAN NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**MUFTI SHOLIH
0704160365**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI FILSAFAT
DEPOK
JANUARI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini, saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

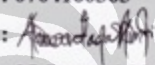
Depok, 05 Januari 2010



Mufti Sholih

HALAMAN PERNYATAAN OTENTISITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Mufti Sholih
NPM : 0704160365
Tanda Tangan : 
Tanggal : 05 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh


Nama : Mufti Sholih
NPM : 0704160365
Program Studi : FILSAFAT
Judul : Pembebasan Individu dalam Filsafat Pendidikan Paulo Freire dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional.

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora, pada program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : M. Fuad Abdillah, M. Hum ()

Penguji : Dr. Vincentius Jolasa ()

Penguji : Dr. Akhyar Yusuf Lubis ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 04 Januari 2010

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta

NIP : 1965.1023.19903.1002

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas semua rahmat dan hidayah-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pembebasan Individu dalam Filsafat Pendidikan Paulo Freire dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional”, ini disusun sebagai syarat menjadi sarjana humaniora.

Banyak halangan yang merintai penulisan skripsi ini. Skripsi ini telah tertunda selama 1 tahun setengah, dan akhirnya kembali dikerjakan dengan membutuhkan waktu 1 minggu. Untuk itu saya mengucapkan banya terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak dorongan, diantaranya:

1. Alm. Drs. H. A Saepudin dan Hj. Anih R, kedua orang tua biologis saya yang selalu memberikan dorongan moril serta materil selama saya menjadi mahasiswa di Filsafat UI. Juga kepada H. Iding H dan Hj. E. Jamilah, keduannya orang tua angkat saya, yang juga selalu memberikan dorongan moril dan materil. Juga kakak-kakak saya dan ade saya tercinta Ifa Mu'thia R. Tak lupa kepada ibu Emeh, yang mau menerima saya untuk bertempat tinggal selama 5 tahun terakhir ini di Depok.
2. Vincentius Jolasa, Ph.D, selaku ketua departemen Filsafat dan penguji saya, Dr. A. Harwawibawa, selaku sekretaris departemen Filsafat dan juga pembimbing akademis saya, Dr. Naupal Asnawi, selaku koordinator program studi Filsafat, dan M. Fuad Abdillah, M.Hum, selaku pembimbing yang sabar menghadapi kemalasan saya, selama menulis skripsi ini, serta Dr. Akhyar Yusuf Lubis selaku penguji saya.
3. Para pengajar di Jurusan Filsafat, Rocky Gerung, S.S, Tommy F. Awuy, S.S, Dr. Gadis Arivia, Wayan Suwira Satria M.M, Yohanes Pande Hayon, M. Hum, Dr. Donny Gahril Adian, Dr. Embun Kenyowati, Dr. Vincentia Irmayanti, Dr. Selu Margaretha K, Taufik Basari, L.LM, Fahru Novrian, DEA, Irianto Widjaya, M. Hum dan L.G. Saraswati Dewi, M. Hum.
4. Kawan-kawan PendarPena, Sulaiman Sekalangit Harahap, Tia Septian, Hendra Kaprisma, Lambertus Berto Tukan, Oscar Ferry dan Tri Haptiko Soekarso. Terima kasih telah menjadi kawan disaat susah dan senang selama hampir 3 tahun kita membangun PendarPena.

5. Kawan-kawan KOMAFIL 2004, Dimas Okto, Dwi SAN, Satriyo, Firly Afwika, Danang Budiawan, Nanda Hera, Windo W, Willy Sulistio, Zaky Ma'rufi, M. Ali, M. Indra, I.G.M Arya, Bunga Noladika, Aryadi Sukmana, Riski Yulistiani, Krisna Budiman, Hafiz Zaskuri, Yusuf Fitra, Erika Iswari, Raras CM, Rianty Rusmalia, Anita Yanuari, serta yang tak disebutkan.
6. Senior di Filsafat UI, Bang Daniel Hutagalung, Bang Hendrik Papi Boli Tobi, Bang Mikael D, Mbak Ikhaputri Widiyantini [thanks for everything, mbak. :-)], Pratiwi Sinaga, Stephani Natalia, Rizqi Rinaldi M, Rangga Wisnumerta, dan Erik Cahyanta, juga junior di Filsafat, Ezra Dwi, Ivan Penwin, M, Yoga Ramadhan [Thanks for every single moment, lilbro] Yudhistiro Nugroho, Giska A, Eki Triwulan, M, Rifki, Vicky Ardian A, Timothius K, Arie Saptahadi, Airlangga Noer, Wannihag, Arianne M, Astrid S, Trully R, Fauzan Alkadri, Leo Panji, Efriani Effendi, Siti Masquratul A, Bayu Fajri, Agung Setiawan, Arswandaru Cahyo, Yohanna M, Claudia Scolastika, Yulia Angela dan Agrita.
7. Kawan-kawan di FIB, Indro Bagus Satrio Utamo [minya, thanks for knowledge, bro], Ayusya Abiansekar, Gema Mawardi, Tatang H, Mas Savril, Elpino Windy, Kartika Indiriani R, M, Ariffudin Rangga, Ayu Poernamaningrum, Fikri Hadi, Abdullah Sammy, Aditya Kharisma, Pahotan Franto, Alfianti Arfani, Laire Siwi, Laras Nurditia, J.C. Pramudia Natal, Rakyat Militan Sastra, Coach Agus, Febrina Anindita Charini, Ikhwan A, Adhika Irlang, Dhany, Danu, Andri, Riski Rusdi, Billy J. Lutham, Tri Mulyono, Tri Subhi, Ivan A, Sekar, Tita, Shadika.
8. Kakak-kakak saya tercinta, Teh Agni Malagina [terima kasih untuk semua yang teteh kasih] Kak Rosida E, Teh Risna R, Teh Prima Virginia, Teh Laura Riyanti. Segenap keluarga Besar SIMPAY, Dr. Agus Arismunandar, Munawar Holil, M. Hum. Segenap keluarga besar KBS Sindangbarang, Ama Ahmad Mikami, Abah Encem dan Umi, Mang Karna, Mas Sawab. Juga segenap sivitas academia FIB UI, jajaran Satpam, Pengawai Kantin, Cleaning Servis.

9. Dan yang paling penting adalah, rasa terima kasih yang paling mendalam untuk Syarifah Ratna Putriyantini, untuk semua kesempatan, kesabaran, kegigihan, dan rasa cinta serta sayang yang diberikan selama ini.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Selain itu, saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat membantu semua pihak yang membutuhkan dan sedang mengkaji problem pendidikan di Indonesia.

Long live Freedom...

Depok, 05 Januari 2010

Mufti Sholih

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufti Sholih
NPM : 0704160365
Program studi : Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

” PEMBEBASAN INDIVIDU DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN PAULO FREIRE DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN NASIONAL”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Depok
Pada tanggal : 05 Januari 2010

Yang Menyatakan

(MUFTI SHOLIH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pernyataan Thesis	9
1.4 Konsep dan Kerangka Teoritis	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 FILSAFAT PENDIDIKAN PAULO FREIRE	15
2.1 Riwayat dan Latar Belakang Kehidupan Paulo Freire	15
2.2 Karya-karya Paulo Freire	18
2.3 Aliran Pemikiran Yang Mempengaruhi Paulo Freire	19
2.3.1 Teologi Pembebasan	20
2.3.2 Marxisme	22
2.3.2 Eksistensialisme	24
2.3.4 Fenomenologi	25
2.4 Konsep Pendidikan Paulo Freire	25
2.4.1 Pendidikan Tidak Bisa Dipisahkan dari Aspek Politik	26
2.4.2 Pendidikan sebagai Proses Penyadaran (Konsientisasi)	26
2.4.3 Pendidikan Merupakan Proses Humanisasi	27
2.4.4 Pendidikan Hadap Masalah dan Dialog sebagai Metode Humanisasi	28
2.5 Pendidikan Pembebasan Dalam Pemikiran Paulo Freire	30
BAB 3 PROSES PEMBEBASAN INDIVIDU	
DALAM PENDIDIKAN	35
3.1. Aku sebagai Individu yang Otonom	35
3.1.1 Menyoal Individu	35
3.1.2 Individu sebagai Manusia Ideal	36
3.1.3 Individu sebagai Manusia Tertindas	38
3.1.4 Individu sebagai Manusia Bebas	39
3.2 Situasi Penindasan	41
3.2.1 Pendidikan yang Menindas	41
3.2.2 Masifikasi Pendidikan	43
3.3 Masyarakat Tertutup sebagai Hasil dari Situasi Penindasan	45

3.4 Situasi Pembebasan	46
3.4.1 Pendidikan yang Membebaskan	46
3.4.1.1 Pendidikan Hadap Masalah sebagai Langkah Awal Pembebasan	48
3.4.1.2 Dialog sebagai Jalan Pembebasan	51
3.4.2 Konsientisasi	54
3.5 Masyarakat Terbuka sebagai Hasil dari Situasi Pembebasan	57
3.6 Proses Pembebasan Individu dalam Pendidikan	58
BAB 4 REPOSISI SUBJEK DALAM PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN NASIONAL.....	62
4.1 Reposisi Subjek	62
4.2 Reorientasi Pendidikan	64
4.3 Transformasi Sosial sebagai Manifestasi Reorientasi Pendidikan	66
4.4 Relevansi Reposisi Subjek dengan Pendidikan Nasional	69
4.4.1 Gambaran Subjek dalam Pendidikan Nasional	69
4.4.2 Relevansi Reposisi Subjek terhadap Keberadaan Subjek dalam Pendidikan Nasional	71
4.4.2.1 Memaknai Ulang Kurikulum	73
4.4.2.2 Memaknai Ulang Ujian Nasional	75
4.4.2.3 Memaknai Ulang Pendidikan Nasional.....	77
BAB 5 PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Nama : Mufti Sholih
Program Studi : Filsafat
Judul : **Pembebasan Individu dalam Filsafat Pendidikan Paulo Freire dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional.**

Skripsi ini membahas mengenai posisi individu dalam sistem pendidikan yang mengideologisasi dan bagaimana alternatif pemikiran pendidikan dari Paulo Freire, dihadirkan sebagai sebuah solusi terhadap masalah ini, yang juga coba dikaitkan dengan posisi individu dalam sistem pendidikan nasional. Tulisan ini mengantakan pembaca untuk melihat bahwa sistem pendidikan yang mengideologisasi, mampu membelenggu kesadaran, kehendak dan kebebasan dari individu. Karenanya, menjadi penting untuk menawarkan sebuah solusi terhadap penempatan individu yang di refresi atas nama sistem ideologisasi. Melalui pemikiran Paulo Freire inilah, yang bertumpu pada pendidikan hadap masalah dan dialog, individu diajak untuk membebaskan dirinya dari selubung ideologisasi yang membelenggu kebebasan, kehendak dan kesadarannya.

Kata kunci :

Individu, Posisi, Freire, Pendidikan Hadap Masalah, Dialog, Pendidikan Nasional

ABSTARCT

Name : Mufti Sholih
Program of Study : Philosophy
Title : **Liberating An Individual in Paulo Freire's
Philosophy of Education and The Relevance with
National Education.**

This bachelor essays studied about the position of an individual in our system of education, that in my point of view our system of education were just an ideological procedures, and how alternative educational thought from Paulo Freire come as the solution to this problem. It's guide you to look that our educational system, restraint awareness, will, and freedom of an individual. Hence, it's important to give a solution to position of an individual. Through Freirean thought, which base on problem-posting education and dialogue, an individual were invited to liberate himself from the ideologization which restraint his freedom, will and awarness.

Keywords :

An Individual, Position, Problem Posting education, Dialogue, National Education

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan sebuah tatanan kehidupan suatu negara biasanya selalu diiringi oleh fondasi-fondasi yang dibangun untuk menjadi dasar dari negara tersebut. Hal tersebut sengaja dipersiapkan untuk membangun kerangka negara yang kuat dan mampu membuat negara tersebut tetap berdiri untuk dapat menghadapi setiap tantangan baik eksternal maupun internal.

Salah satu fondasi yang biasanya menjadi hal yang penting adalah pendidikan. Pendidikan sejatinya merupakan sebuah instrument yang berguna untuk membantu warga negara agar dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin.¹ Kondisi seperti ini membuat pendidikan menjadi sebuah fondasi dasar yang akhirnya selalu mendapat perhatian demi membangun karakter warga negara, dan posisi ini akhirnya dilembagakan menjadi sekolah.

Konsepsi tentang pendidikan sebenarnya merupakan sebuah konsepsi umum yang sejatinya sudah ada dalam pikiran-pikiran kuna, hal tersebut bisa dilihat dari adanya pikiran-pikiran dalam filsuf Yunani kuno seperti Plato ataupun Aristoteles yang telah memulai memperkenalkan pikirannya tentang konsep pendidikan. Konsep yang diajukan Plato adalah konsep pendidikan yang akan dikembangkan dalam sebuah Negara.² Pun demikian dengan Aristoteles yang mengemukakan konsepnya tentang pendidikan untuk warga negara.³ Perjalanan panjang pendidikan akhirnya dilanjutkan sampai sekarang ini. Sehingga konsep

¹ Pendidikan Humanis, makalah tanpa nama pengarang dalam milis diskusipembebasan@yahoo.com, diakses pada tanggal 06 februari 2005.

² Bertrand Russel. *History Of Western Philosophy*. Disunting ke dalam bahasa Indonesia oleh Kamdani . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hlm 176.

³ *Ibid*, hlm 262.

pendidikan dan keberadaan pendidikan merupakan sebuah hal yang pasti dan tak mungkin tak ada dalam sebuah kehidupan manusia dan negara.

Akan tetapi, dalam perjalanannya pendidikan telah mengalami metamorfosa. Bila pada awalnya pendidikan merupakan tugas bersama seluruh warga negara dan negara, lambat laun pendidikan digerus untuk disentralisir hanya menjadi tugas negara ataupun lembaga, sehingga pendidikan terjebak untuk dikooptasi dalam makna yang cukup sempit yaitu sekolah.

Sekolah, sebagai manifestasi dari konsep pendidikan yang dilembagakan oleh negara, tentunya memiliki visi dan orientasi. Dalam hal ini biasanya, visi dan orientasi yang dimiliki oleh sekolah akan selalu sama ataupun disesuaikan dengan visi dan orientasi ideologi negara. Hal ini dikarenakan, ideologi merupakan sebuah patokan dari sistem nilai, tindakan, dan pemahaman yang ada dalam kerangka kenegaraannya, dan pendidikan adalah bagian dari proses pengembangan SDM, yang dipersiapkan untuk melanjutkan dan mengembangkan kehidupan negara kedepan, sehingga pertautan antara keduanya cukup erat.

Pun begitu yang terjadi pada negara-negara berkembang, visi dan orientasi ideologi pendidikannya selalu disesuaikan dengan visi dan orientasi ideologi politik negara. Dalam kondisi ini, biasanya orientasi pendidikan yang diterapkan dalam negara berkembang adalah orientasi pembangunan. Akan tetapi, orientasi pembangunan yang diarahkan untuk mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomilah yang kemudian diletakan sebagai dasar dari orientasi pendidikan negara berkembang, pada akhirnya menghasilkan kondisi yang berseberangan dengan nilai sejati yang ingin dikembangkan oleh pendidikan itu sendiri. Pada kenyataannya para pelajar yang merupakan peserta didik dijejali seperangkat ilmu dan pengetahuan yang bersifat teknis dan berjauhan dari realitas sebenarnya, tanpa pernah diajak untuk mampu memahami problem-problem dalam ilmu pengetahuan yang didapat, yang berkaitan dengan dunia yang mereka tempati.

Dalam kondisi inilah pendidikan terkesan dipaksakan untuk disahkan dari realitas sosial yang ada. Kondisi semacam ini semakin diperparah dengan keinginan negara dalam melakukan “pembangunan karakter” warga negaranya,

agar sesuai dengan ideologi yang diamini negara tersebut. Proses ini merupakan sebuah proses pengkristalan nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan dengan cara menyuntikan pemahaman-pemahaman ideologis tentang karakter kebangsaan yang kaku melalui jalur pendidikan agar setiap peserta didik menjadi murid yang taat sesuai aturan yang diberlakukan. Proses inilah yang dinamakan dengan proses ideologisasi dalam pendidikan.

Pada proses semacam ini, kita bisa melihat perbedaan yang mendasar antara ideologi pendidikan dan ideologisasi pendidikan. Jika ideologi pendidikan adalah seperangkat nilai dasar dari kerangka operasional dan orientasi sistem pendidikan yang ada, maka ideologisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam pendidikan dengan cara menanamkan seperangkat nilai yang diamini oleh sebuah kelompok berideologikan tertentu, untuk dijalankan secara kaku dan membelenggu.

Disinilah letak kesalahan yang terjadi, yakni terjadinya ideologisasi dalam pendidikan, yang mengarahkan setiap individu sebagai seorang peserta didik terasing dari keinginan yang ada dalam dirinya, sehingga kebebasannya pun kemudian dibelenggu atas nama rencana pengembangan SDM. Dalam hal ini, pendidikan bukan lagi bergerak sebagai wahana kebudayaan yang sejatinya akan membuat individu mengeluarkan kemampuannya secara optimal, akan tetapi sebaliknya, membuat kemampuan individu tidak optimal. Karenanya dalam hal ini, terlihat bahwa ada motif keterpaksaan yang dibangun dalam nalar individu untuk memahami dan menjalani kehidupannya sebagai seorang peserta didik yang belajar di bangku sekolah, walhasil kemampuan nalar individu untuk membongkar fenomena disekelilingnya pun terdegradasi.

Dari kejadian ini, terlihat bahwa konstruksi pembangunan pemahaman dalam pendidikan yang tidak bersandar pada kebebasan individu untuk menjalani proses belajarnya, akan menghasilkan penegasian eksistensi dan kebebasan individu itu sendiri, sehingga tak jarang modus *drop out* pun dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam sekolah tersebut terhadap individu, tatkala mereka membangkang terhadap alur kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari hal tersebut, saya melihat bahwa rumusan kebijakan pendidikan yang seperti ini, telah merepresentasikan sebuah konstruksi hegemoni ideologi tertutup yang diideologisasikan, sehingga pendidikan terjebak menjadi instrument yang digunakan oleh pemilik otoritas kekuasaan untuk mengontrol individu dalam sebuah negara. Dari sisi ini pun, terlihat bahwa konsep pendidikan yang memerdekakan individu dalam memaknai realitasnya, akhirnya tergerus dan hilang karena ternegasikan oleh kepentingan politik yang berkuasa, yakni dengan menetapkan tujuan untuk menyetir, mengeksploitasi serta memisahkan individu dari realitas sosial yang secara personal melingkupinya.

Dari kondisi yang demikianlah, motif pendidikan akhirnya tereduksi untuk menjadi sebuah cara atau mekanisme kontrol ideologis penguasa terhadap warganya serta menjadikan pendidikan sebagai mekanisme reproduksi.⁴ Dalam kondisi yang demikian, pendidikan akhirnya terjebak menjadi sebuah mekanisme pembohongan, yang dilakukan pemerintah. Hal ini terjadi karena konsepsi pendidikan yang demikian, jelaslah tidak berkorelasi dengan apa yang diinginkan oleh individu. Selain itu konsepsi nilai yang dijadikan patokan jelas telah mencerabutkan individu dari apa yang lebih menjadi inti dari kenyataan yang dihadapinya dan juga menegasikan pilihan bebas individu dalam menjalani kehidupannya sendirinya.

Pada posisi ini, reduksi makna yang dilakukan pada wilayah pendidikan inilah yang coba digugat ulang oleh Paulo Freire. Freire melihat bahwa pendidikan telah mengalami penyempitan makna dengan menjadikan proses ideologisasi yang terjadi didalamnya sebagai mekanisme kontrol, sehingga dalam proses pendidikan terjadilah apa yang disebut dengan penindasan.

Penindasan yang dalam konteks ini, telah menandai munculnya individu-individu yang kemanusiaanya dirampas atau dengan kata lain disebut

⁴ Louis Althusser . *Lenin and Philosophy, and Other Essays..* yang disunting ke dalam bahasa Indonesia oleh Darmawan dengan Judul *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Yogyakarta: Resist Book, 2007. hlm 151.

dehumanisasi.⁵ Proses penindasan dan dehumanisasi ini berjalan seiringan dengan dibodohnya individu oleh kekuatan mitos-mitos dan oleh iklan-iklan yang jitu serta kampanye ideologis.⁶ Pada proses ini, posisi individu diletakan dalam kerangka kerja ideologi, yang membuat individu tidaklah bebas, atau dengan kata lain individu tidaklah menjadi subjek atas dirinya, padahal menurut Freire individu akan semakin utuh jika ia menjadi subjek atas dirinya.⁷

Implikasi logis dari apa yang dilaksanakan pendidikan seperti ini adalah tercerabutnya kesadaran individu dalam proses pembelajaran, sehingga kesadaran individu untuk melihat realitas yang sebenarnya terjadi, seolah tertutupi dan berjalan tidak apa adanya. Posisi seperti ini, memungkinkan untuk tetap dilaksananya penindasan dan dominasi negara terhadap hak-hak warga negaranya dan terlebih pada hak-hak individu.

Karenanya, dalam hal inilah keberadaan filsafat pendidikan Paulo Freire menjadi cukup penting, karena Freire dengan konsep filsafat pendidikan yang ia usung, ingin menghilangkan ketertindasan yang dialami oleh individu dalam pendidikan agar kembali menjadi bebas. Pada posisi ini pula, Freire merumuskan konsep pendidikan yang bersebrangan dengan proses mistifikasi dan pembodohan, yakni pendidikan yang mampu membuat manusia berani membicarakan masalah-masalah lingkungannya dan turun tangan dalam masalah tersebut, serta pendidikan yang mampu memberikan manusia kewaspadaan terhadap bahaya yang dapat membuat manusia terbodohi.⁸ Sehingga pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pendidikan yang mampu membebaskan individu dari proses ketertindasan yang sedang dialaminya dalam proses pendidikan.

⁵ Paulo Freire. *Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan* dalam *Menggugat Pendidikan*, disunting dan diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. hlm 434.

⁶ Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Aloisius A. Nugroho Jakarta : Gramedia, 1984. hlm 6.

⁷ *Ibid*, hlm 4.

⁸ *Ibid*, hlm 34.

Sehingga dari permasalahan tersebut, akhirnya penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PEMBEBASAN INDIVIDU DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN PAULO FREIRE DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN NASIONAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Negara dalam pemahaman yang idealis, kita ketahui merupakan sebuah rumah yang bisa mendidik warganya untuk mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya. Karena itu amatlah sangat tidak mungkin jika keberadaan sebuah negara menegasikan muatan pendidikan dalam salah satu program pengembangan sumber daya manusianya. Dilandasi oleh hal tersebut, pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat niscaya untuk diterapkan dalam sebuah negara, dan karena itulah sekolah-sekolah dibangun atas nama tujuan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam perjalanannya, sekolah akhirnya menjadi refresentasi dari sistem pendidikan yang sedang dikembangkan dalam satu negara. Sistem pendidikan ini, tentunya memiliki basis sandaran ideologi dalam tubuhnya, karena sebagaimana kita ketahui, ideologi merupakan sebuah konsep dasar yang dijadikan patokan untuk bertindak, berpikir dan memahami.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pendidikan yang memiliki basis ideologi sebagai landasan operasional dari paradigma pendidikannya, seringkali disalahartikan. Pendidikan yang sejatinya akan menjadi wahana tumbuhnya kreatifitas terkadang dibengkokan menjadi wahana ideologisasi. Dari kondisi inilah kemudian, sistem pendidikan yang dibangun berubah arah menjadi instrument kampanye dari nilai-nilai ideologis yang ingin diterapkan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Sebagai contoh, hal ini terungkap dari kritik Ki Hajar Dewantara terhadap bentuk pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial terhadap penduduk Hindia Belanda saat kolonialisasi terjadi

di Indonesia, yakni membuat ketergantungan warga terhadap penjajahnya saat itu.⁹

Kecenderungan tersebut pada prosesnya mengiring pendidikan untuk menjadi tidak otonom. Dalam hal ini cenderung ada kesan bahwa pendidikan dihadirkan karena adanya kepentingan ideologis dari para penguasa sebuah negara atau dengan kata lain pendidikan merupakan bagian dari sebuah kerangka kerja ideologis yang dibentuk oleh negara dalam tujuan untuk mereproduksi sumber-sumber daya manusia.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, maka terkesan bahwa orientasi pendidikan yang selama ini dijalankan dalam sebuah negara, amatlah sangat mustahil bergeser dan tidak dikooptasi secara ideologis oleh kerangka ideologi negara yang dijalankan dengan cara mengideologisasi. Dalam perjalanannya, kondisi yang demikian mengakibatkan pendidikan yang dilembagakan melalui sekolah dan juga menjalankan proses ideologisasi tersebut, lambat laun mengikis daya kritis dari nalar manusia, karena pada akhirnya pendidikan hanya menjadi instrument yang digunakan sebagai sebuah mesin penghasil tenaga kerja belaka,¹¹ dan pembentuk watak manusia yang berideologi tertutup. Sehingga, kita pun bisa melihat hal tersebut dalam sejarah pendidikan yang telah tercatat, yakni sejarah tentang pendidikan yang telah menjalankan fungsinya, dalam mempropagandakan tatanan masa kini, dan implikasinya adalah pembangunan sekolah-sekolah yang dikaburkan dan dibengkokkan oleh ketidaksadaran tentang tradisi kritis.¹²

⁹ BI Purwanti dalam *Pendidikan dan Kolektivitas Untuk Bumiputera* dalam milis diskusipembebasan@yahoo.com, diakses Januari 2005.

¹⁰ Louis Althusser dalam *Essay On Ideology*, yang diterjemahkan oleh Olsy Vinoly Arnof dengan judul *Tentang Ideologi*, Yogyakarta : Jalasutra. 2004, hlm 7.

¹¹ *Ibid*, hlm 9.

¹² Joel H Spring. *Anarkisme dalam Pendidikan: Tradisi Para Pembangkang dalam Menggugat Pendidikan*. 2001, hlm 500.

Dari kondisi yang berjalan seperti ini, akhirnya pendidikan yang dilakukan dengan cara mengideologisasi, berhasil membuat kesadaran individu sebagai seorang peserta didik dideterminasi oleh tuntutan ideologi, karena individu yang berposisi sebagai subjek, diinterpelasi sebagai subjek (bebas) agar ia taat sepenuhnya pada perintah *Subjek-Subjek* lainnya. Dalam posisi ini individu jelas berada diluar ideologi tapi kemudian dicaplok oleh ideologi untuk dibentuk.¹³ Posisi ini jelas memperlihatkan bahwa individu tidak memiliki posisi dalam pendidikan semacam ini, karena individu hanya dipersepsikan sebagai barang yang hendak dibentuk, diisi maupun diciptakan. Posisi kesadaran individu dengan jelas diletakan diluar sistem bahkan mungkin sengaja ditiadakan, sehingga hal semacam ini membuat individu kehilangan eksistensinya sebagai manusia, dalam kondisi ini, individu seolah tak bisa menyiapkan diri untuk hidup di masa dewasa dalam masyarakat tanpa melalui pendidikan.¹⁴

Kondisi tersebut dengan tegas menegaskan individu sebagai seorang manusia yang memiliki daya kreatifitas dan juga nalar yang kritis serta kebebasan yang dimilikinya. Sehingga posisi individu dalam pendidikan semacam ini, akhirnya selalu tak pernah dianggap ada, individu selalu dianggap sebagai sebuah “bejana kosong” yang harus diisi.¹⁵ Selanjutnya sekolah seolah berkata bahwa mereka membentuk manusia untuk masa depan dengan cara menawarkan pendidikan *untuk* hidup bukan pendidikan *dalam* kehidupan sehari-hari.¹⁶

Kondisi ini jelas sangat merugikan dalam proses pembelajaran, karena pada akhirnya nilai yang terbangun dari pendidikan bukan lagi proses penyadaran akan tetapi pembedahan, karena individu hanya dijejali teori-teori ilmu

¹³ Dominic Strinati. *An Introduction To Theories Of Popular Culture*. London & New York : Routledge, 2003. hlm 137.

¹⁴ Ivan Illich, *Alternatif Persekolahan dalam Menggugat Pendidikan* *Op. Cit.* 2001, hlm 519.

¹⁵ Paulo Freire. *The Politics Of Education* yang diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dan Fuad A . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. hlm xi.

¹⁶ Ivan Illich, *Op. Cit.* 2001 hlm 523

pengetahuan tanpa pernah mengeluarkan atau mencari sendiri teori atau realitas lain yang hendak dipahaminya, dengan kata lain keberadaan individu sebagai subjek akhirnya diposisikan sebagai objek, yang kemudian akan menjadikan individu terasing dan tercerabut dari realitas dirinya sendiri, dan realitas dunia sekitarnya.¹⁷

Karena itu dalam kasus ini, keberadaan individu dalam memahami problem realitas sosial dan kulturalnya ternegasikan. Dalam perjalanannya individu terbelenggu untuk memerdekakan dirinya dari konstruk dan kondisi ini. Sehingga individu dalam kondisi yang demikian, menjadi individu yang tidak bebas dalam mengaktualisasikan dirinya karena belenggu tersebut. Dengan kata lain, peran dan posisi individu diletakan dalam posisi objek, dan pada posisi inilah pendidikan tidak mampu berperan dalam menjadikan individu sebagai individu bebas. Karena kondisi tersebut, maka etos pembebasan menjadi sebuah hal yang mesti dihadirkan dalam proses pembelajaran.

Karenanya, dalam hal ini penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya tawaran konsep pendidikan dari Paulo Freire yang berhubungan dengan :

- Konsep pembebasan individu dalam pendidikan
- Mengapa pendidikan itu harus membebaskan
- Relevansi konsep pembebasan individu terhadap pendidikan nasional

1.3 Pernyataan Thesis

Penempatan individu dalam pendidikan yang dijalankan dengan cara mengideologisasi, telah banyak mengekang kehendak, kebebasan, dan kesadaran individu, maka reposisi dalam pendidikan harus dikembangkan untuk membebaskan individu dari keterikatan dan belenggu tersebut. Dalam hal ini, reposisi individu akan mampu :

¹⁷ Paulo Freire, *Op. Cit*, 2002, hlm xii

- Menghilangkan pengekan pada kehendak individu.
- Memberikan ruang kebebasan pada individu.
- Mengembangkan kesadaran kritis individu.

1.4 Konsep dan Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan mengenai keterbelengguan individu dalam pendidikan ini, penulis berusaha memulai penelitian dengan memahami teori tentang pendidikan yang membebaskan yakni pendidikan yang bertumpu pada aspek kritisisme dari Paulo Freire.

Paulo Freire mendasarkan teori pendidikannya pada konsep pendidikan yang luas, dimana ia tidak meletakkan konsep pendidikan tersebut pada sebuah definisi yang kaku yakni sekolah. Bagi Freire, sekolah telah memainkan peranan yang sangat vital sebagai instrument kontrol sosial yang efisien untuk menjaga status quo.¹⁸ Dalam hal ini pula, Freire melihat bahwa kurikulum yang diajarkan di sekolah adalah kurikulum tradisional yang tidak menunjukkan aktivitas konkret dan tidak menunjukkan kesadaran kritis.¹⁹ Fenomena seperti ini jelas telah membawa konsep pendidikan bukanlah sebagai sebuah gagasan yang mampu membawa setiap individu untuk mampu bersikap kritis, tapi malah sebaliknya, yakni membuat setiap individu terjajah bahkan tercerabut dalam dunia kesehariannya karena pendidikan terlepas dari aktivitasnya yang konkret.

Teori pendidikan kritis dari Paulo Freire ini, diwarnai juga oleh konsepsi teologi pembebasan yang berkembang di Amerika Latin sekitar tahun 1950an, disamping itu juga, konsepsi pendidikan kritis ini juga diwarnai oleh pemikiran dari teori kritis marxis yang melihat adanya pola dominasi dan hegemoni dalam sistem sosial yang masih dan semakin ingin memantapkan fondasi bangunan status quo yang menindas kaum miskin.

¹⁸ *Ibid*, hlm 195

¹⁹ *Ibid*, hlm 37.

Pendidikan kritis dari Freire menilai bahwa pendidikan haruslah bersifat membebaskan, metode yang ditawarkan yakni dengan adanya dialog yang memungkinkan peserta didik dan fasilitator untuk memecahkan dan merumuskan konsep yang dapat membantu dalam menanggulangi problem yang ada, dalam posisi ini pula, dialog tidak hanya dipahami sebagai metode pembelajaran yang bersifat politis tetapi juga sebagai cara dalam tiap ungkapan eksistensi manusia. Selain itu, konsep dialog yang dijalankan dalam pendidikan kritis Freire, juga dibangun diatas semangat cinta, kerendahan hati, harapan, kepercayaan dan iman.²⁰

Dari sinilah, akhirnya penulis ingin memperlihatkan bahwa etos pembebasan yang bertumpu pada dialog yang setara dalam sebuah sistem dan kerangka pendidikan merupakan sebuah hal yang penting, karena dengan hal tersebutlah, keterarahan antara sistem dan kehidupan individu sebagai peserta didik terpadu. Karenanya, hal ini pun menjadi penting karena etos pembebasan tersebut mampu memberikan ruang gerak pada individu dalam memahami, memilih dan mengekspresikan keinginan dirinya sendiri dalam pendidikan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- Menunjukkan bahwa ada mekanisme yang salah dalam sistem pendidikan yang melakukan cara ideologisasi dalam memposisikan individu
- Mendorong sekolah atau para pendidik untuk membangun kesadaran kritis tentang adanya pilihan bebas peserta didik sebagai individu yang bebas menentukan pilihannya.
- Menunjukkan bahwa konsep orientasi pendidikan yang dibangun dengan tujuan mereproduksi kekuatan produksi sudah tidak sepantasnya lagi diterapkan dalam dunia pendidikan kita hari ini.

²⁰ *Ibid*, hlm 45.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bertumpu pada berbagai sumber bacaan sebagai bahan penulisan, seperti buku *the politics of education, pedagogy of the oppressed* karya Paulo Freire. Paulo Freire dalam karya-karyanya tersebut terpengaruh oleh pemikiran teori kritis, yang melihat bahwa dalam pengetahuan tidaklah bebas nilai, karena mengandung muatan representasi politik dari penguasa, yang kemudian disembunyikan dalam kurikulum. Pendidikan kemudian dijadikan instrumen untuk reproduksi sosial yang kemudian akan dikembangkan untuk menghancurkan dunia kehidupan individu untuk dapat berjalan sesuai dengan sistem.

Dalam karyanya ini pula, Freire menggunakan pendekatan pedagogi kritis, yakni sebuah aliran pedagogi yang menggunakan pendekatan humanistik politik yang memperhatikan hak-hak azasi manusia di dalam kehidupan manusia yang di dominasi oleh sistem kekuasaan yang sudah mapan. Dalam pedagogi ini, tugas pendidikan adalah melepaskan individu dari cengkraman nilai-nilai budaya yang sudah mapan dan menjadi penghambat dan memenjarakan perkembangan individu.²¹

Disamping itu penulis terbantu juga oleh pustaka sekunder dari Peter Roberts, Peter McLaren, H.A.R. Tillaar, dll. Selanjutnya penulis menggunakan metode kritis reflektif, yakni metode pembacaan yang kritis untuk kemudian merefleksikannya lagi dengan cara '*hermeneutics of suspicious*' atau hermeneutika curiga agar dapat menginterpretasikan, mengelaborasi dan merumuskan kembali maksud dari buku yang dijadikan patokan oleh penulis.

²¹ Mohamad Fuad. *Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Sosial : Telaah Filosofis terhadap Filsafat Pendidikan Paulo Freire*. Tesis pada Program Pascasarjana Departemen Filsafat FIB UI. Depok. 2003. hlm. 146.

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang akan digunakan :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mencoba menerangkan apa yang menjadi latar belakang masalah sekaligus mempermasalahkan hal tersebut. Penulis mencoba mengangkat problem kebebasan individu yang dinegasikan oleh kebijakan pendidikan yang dikonstruksi oleh sebuah ideologi. Sehingga individu tercerabut dari realitasnya sebagai manusia yang memiliki kesadaran untuk menentukan langkahnya. Selanjutnya dari permasalahan tersebut akan terlihat posisi masalah yang sebenarnya menjadi inti dari pembahasan skripsi ini.

BAB 2 : FILSAFAT PENDIDIKAN PAULO FREIRE

Dalam bab ini penulis mencoba mengelaborasi pemikiran Paulo Freire secara umum tentang pendidikannya. Disamping itu pada bab ini akan dibahas akar-akar epistemologis yang akhirnya mempengaruhi dan membuat Freire mengemukakan teori-teori tentang pendidikannya. Sehingga landasan epistemologis dari Paulo Freire bisa dilihat sebagai sebuah kerangka teoritis dalam pembahasan skripsi ini

BAB 3 : PROSES PEMEBEBASAN INDIVIDU DALAM PENDIDIKAN

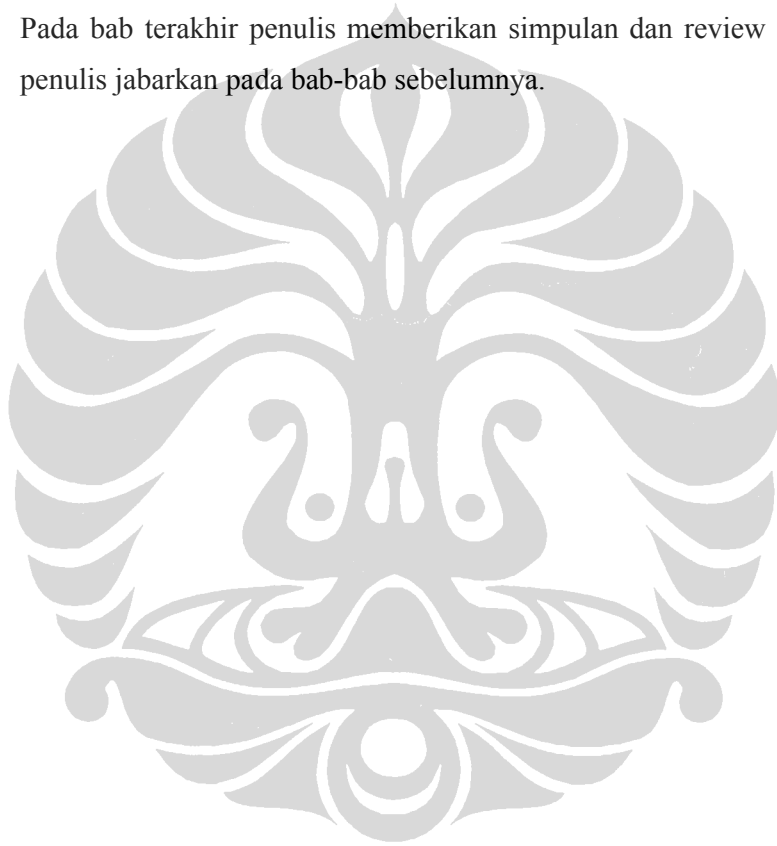
Pada bab ini, penulis ingin mengkaji bagaimana konsep pendidikan pembebasan dihadirkan sebagai sebuah gugatan epistemologis terhadap konsep pendidikan yang ada sebelumnya. Pada bab ini pula konsep tentang individu dalam pendidikan coba dielaborasi lebih lanjut, karena pembebasan individu merupakan sebuah syarat mutlak dalam pendidikan. Disamping itu pada bab ini pula, konsep pendidikan pembebasan dihadirkan sebagai sebuah aksi kultural pembangunan kesadaran kritis dalam masyarakat.

BAB 4 : REPOSISI SUBJEK DALAM PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PROSES PENDIDIKAN NASIONAL

Pada bab ini penulis ingin menelusuri posisi individu yang merupakan subjek dalam dunia pendidikan dalam pendidikan nasional. Pada bab ini pula, konsep reposisi dan reorientasi coba penulis sajikan sebagai kerangka awal menuju analisa terhadap kondisi pendidikan nasional. Selanjutnya penulis berupa untuk melihat bagaimana relevansi pendidikan yang membebasakan dan reposisi subjek, bertitik temu dengan konsep pendidikan nasional.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab terakhir penulis memberikan simpulan dan review dari apa yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2

FILSAFAT PENDIDIKAN PAULO FREIRE

2.1. Riwayat dan Latar Belakang Kehidupan Paulo Freire

Paulo Regrus Neves Freire atau yang lebih dikenal dengan nama Paulo Freire merupakan seorang anak dari pasangan Joaquim Freire dan Edeltrudes Neves Freire. Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan miskin di Brazil. Freire terlahir dalam keluarga kelas menengah, yakni dari seorang ayah yang bekerja sebagai polisi militer dan ibunya yang seorang ibu rumah tangga. Akan tetapi, Freire kecil harus menjalani kehidupannya dalam situasi kemiskinan akibat krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 1929 yang menghinggapi Brazil dan secara tak langsung menghinggapi keluarganya pula. Kondisi tersebut kemudian harus dirasakan oleh Freire sebagai pengalaman yang bahagia bagi kehidupannya kelak. Keadaan ini pula yang menjadi sebuah pengalaman yang cukup kuat mempengaruhi hidupnya seperti ketika ia menjadi murid miskin yang harus terbiasa menahan rasa lapar ketika ikut belajar.

Pada tahun 1931, ayah Freire meninggal dunia sesaat setelah mereka berpindah rumah ke daerah Jabatao. Akibat kendala finansial ini pun, Freire terpaksa harus lulus 2 tahun lebih lama dari seharusnya. Pada tahun 1932, yakni setahun setelah ditinggal mati oleh Ayahnya, Freire yang masih berusia 11 tahun dan ketika keluarganya masih mengalami kesulitan finansial, membulatkan tekadnya untuk berjuang melawan kelaparan.²² Akan tetapi, beberapa tahun kemudian kondisi ekonomi keluarga Freire membaik dan ia pun menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Recife dengan menyambi menjadi seorang guru honorer di sebuah sekolah menengah.

Selepas menamatkan kuliahnya, Freire diangkat menjadi pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial dan dari pekerjaan inilah, Freire akhirnya semakin sering

²² A. Agus Nugroho. *Tetapan-tetapan Antropologis dalam Filsafat Pendidikan Paulo Freire*, Skripsi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Jakarta. 1982. hlm 9.

bersentuhan dengan kaum miskin kota yang akhirnya mengantarkannya untuk merumuskan sebuah konsep komunikasi baru dengan kaum miskin ini. Freire, sering kali mengunggkap keprihatinannya kepada kaum miskin kota ini dalam beberapa kuliah dan seminar yang diadakan di Universitas Recife, dan atas dasar keprihatinan ini pula, Freire akhirnya menyelesaikan kuliah doktoralnya pada tahun 1959 dalam bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan di Universitas Recife.

Awal 1960-an, Brazil mengalami gejolak politik. Gerakan-gerakan politik dari sayap kanan maupun sayap kiri berkembang dan mulai memaksakan tujuan politik masing-masing. Pada saat yang bersamaan, Brazil akan mengadakan pemilihan umum. Akan tetapi, peserta yang berhak mengikuti pemilihan umum hanya sekitar kurang dari setengah jumlah semua penduduk Brazil. Hal ini disebabkan oleh hak pilih hanya ada bagi warga yang bisa membaca dan menulis, sedangkan hampir $\frac{3}{4}$ dari jumlah rakyat Brazil tidak bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu, berjuta-juta warga Brazil tak mampu menggunakan haknya karena mereka buta huruf. Implikasi logis dari hal ini adalah keuntungan politik yang didapatkan oleh minoritas penguasa. Saat itu, seorang pemimpin populis bernama Joao Goulart berhasil memikat perhatian warga Brazil dan mengantarkannya menjadi Presiden. Goulart pun mulai mengeluarkan kebijakan yang populis dengan mengadakan program pemberantasan buta huruf. Pada saat yang bersamaan, Freire juga terpilih sebagai direktur utama lembaga pengabdian masyarakat di Universitas Recife yang bergerak dalam penanganan masalah buta huruf.

Aksi politik yang kultural ini berhasil membawa dampak yang cukup signifikan. Dengan metode yang dialogis hasil rumusan Freire, setiap individu akhirnya bisa membaca hanya dalam waktu 30 menit. Freire pun dianggap berjasa karena telah menumbuhkan sepercak harapan baru dalam hati warga miskin Brazil yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Di sinilah Freire

menggunakan metode berpolitik tanpa menjadi kontestan,²³ yang ketika itu dianggap oleh militer dan tuan tanah sangat radikal dan berbahaya.

Militer yang bersekutu dengan tuan tanah melakukan kudeta terhadap Goulart pada bulan April 1964. Semua elemen yang dianggap progresif disingkirkan dan Freire pun tak luput dari hal itu. Freire dijebloskan ke dalam bui selama 70 hari dan setelah itu diasingkan ke Chile. Di Chile inilah Freire mengevaluasi konsep pendidikannya yang akhirnya membawanya untuk menuliskan sebuah karya yang sampai detik ini masih menjadi rujukan para paedagog,²⁴ yakni *Education as the Practice of Freedom*. Setelah bukunya terbit, Freire banyak diundang untuk menjadi profesor tamu yang memberi kuliah tentang filsafat pendidikan seperti yang dilakukannya di *Harvard's Center for Studies in Education and Development* dan tenaga ahli serta anggota kehormatan pada *Center for The Study of Depelopment and Social Change*.²⁵ Di Amerika Serikat ini pula ia mulai mengubah konsepnya tentang problem dunia ketiga yang semula ia definisikan dalam kerangka geografis menjadi kerangka politis. Ia melihat bentrokan fisik dan problem rasial yang terjadi di Amerika, sehingga sejak itulah ia pun melihat bahwa problem kekerasan memang menghantui siapa saja dan akhirnya selalu menjadi tema penting dalam setiap tulisannya.²⁶

Setelah meninggalkan Amerika, Freire masih tetap terlibat aktif dalam isu-isu sosial terutama yang berkaitan dengan isu pendidikan. Tahun 1970, Freire menjabat sebagai konsultan di kantor pendidikan Dewan Gereja Dunia di Genewa, Swiss. Ia pun aktif berkeliling Asia dan Afrika untuk mengamalkan dan membantu program-program pendidikan, di samping menjabat sebagai ketua komite eksekutif *Institute for Cultural Action (IDAC)*. Tahun 1979, Freire masih

²³ Made Pramono, *Menyelami Spirit Epistemologi Paulo Freire dalam Epistemologi Kiri*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2003. hlm 128.

²⁴ Istilah yang biasa digunakan untuk para pendidik.

²⁵ *Ibid.* hlm 128.

²⁶ A. Agus Nugroho. *Op. Cit.* hlm 14.

saja berada di pengasingan sampai akhirnya pada tahun 1988 ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan untuk kota Sao Paolo. Di usianya yang ke-75 tahun, Paulo Freire menghembuskan nafas terakhirnya karena serangan jantung pada 2 Mei 1997.

2.2 Karya-karya Paulo Freire

Sebagai intelektual, Freire tentunya juga banyak melahirkan berbagai karya-karya, karya-karya ilmiahnya ini kebanyakan ia tulis dengan menggunakan bahasa Portugis atau Spanyol. Sebagai seorang paedagog, sejatinya apa yang disuarakan oleh Freire hampir dianggap biasa saja, hal ini karena isu pendidikan selalu dianggap sebagai isu tambahan belaka dalam arus pemikiran sosial dan politik. Akan tetapi, karya Freire kemudian menjadi menarik dan unik, karena apa yang ia tuliskan bersandar pada kondisi realitas yang ia hidupi dan jalani, serta pemikirannya yang mencoba keluar dan membongkar situasi kemapanan sosial politik dengan menggunakan pendidikan sebagai alat perlawanan.

Satu diantara karya yang terkenal adalah *Pedagogy of The Oppressed*. Karya ini menginspirasi berbagai tokoh paedagog lainnya di dunia, karena yang dituliskan oleh Freire memberi dorongan pada pendidik untuk mampu merumuskan pendidikan sebagai sebuah usaha memanusiakan kondisi manusia yang dibuat dengan tidak manusiawi. Selain karyanya ini, Freire juga telah menghasilkan buku-buku yang kemudian ia tulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan diterbitkan sebelum ia meninggal, antara lain :

- *Pedagogy of The Oppressed* (1970)
- *Cultural Action for Freedom* (1972)
- *Education for Critical Consciuousness* (1973)
- *Education : The Practice of Freedom* (1976)
- *The Politics of Education : Culture, Power and Liberation* (1985)
- *A Pedagogy for Liberation : Dialog on Transforming Education* (1987)

- *Pedagogy of the City* (1993)
- *Pedagogy of Hope : Reliving Pedagogy of The Oppressed* (1994)
- *Letters to Christina, Reflection on My Life and Work* (1996)
- *Pedagogy of The Heart* (1997)

Adapun karya-karyanya yang diterbitkan setelah Freire meninggal antara lain :

- *Teachers as Cultural Workers : Letters to Those Who Dear Teach* (1998)
- *Politics and Education* (1998)
- *Pedagogy of Freedom* (1998)

Karya-karya Freire tersebut kemudian banyak diterbitkan dan dialihbahasakan ke berbagai bahasa, tidak ketinggalan ke dalam bahasa Indonesia. Freire menelurkan pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan teori dan metode pendidikan khususnya bagi Negara-negara di dunia ketiga, yakni Negara yang memiliki situasi objektif yang sedang berkembang, serta beririsan dengan kondisi ekonomi politik yang kurang stabil.

Karya-karya Freire dianggap oleh *The Brazillian Society for The Progress of Science* mengarahkan terjadinya emansipasi umat manusia, kemerdekaan untuk semua rakyat, keadilan untuk semua manusia yang kemudian mengarahkan semua manusia menuju demokrasi yang sejati dan perdamaian antar semua umat manusia dalam semangat dan nuansa humanisasi dan konsientisasi.²⁷

2.3 Aliran Pemikiran Yang Mempengaruhi Paulo Freire

Laiknya manusia yang lainnya, Freire tentunya bukan seorang filsuf yang hadir tanpa bersinggungan dengan realitas. Pun demikian, ia bukanlah seorang filsuf yang dengan sendirinya mengeluarkan pemikiran tentang konsep pendidikan

²⁷Mohamad Fuad. *Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Sosial : Telaah Filosofis terhadap Filsafat Pendidikan Paulo Freire*. Op. Cit. hlm 32.

tanpa ada jalinan epistemologi yang membangun kematangan intelektualnya. Freire masuk dan menyelami banyak pemikiran untuk kemudian membangun perspektif baru dalam bidang pendidikan, yang digunakannya untuk menjawab situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Semua pemikiran yang ia selami itu, tidak lantas kemudian dia cangkokan kedalam realitas yang ia alami, akan tetapi lebih dulu mengalami *reduksi sosiologis*.²⁸

Karenanya, pemikiran pendidikan Paulo Freire tidak bisa dengan begitu saja diidentifikasi sebagai varian dari satu pemikiran, akan tetapi jauh sebagai sebuah sintesa dari berbagai pemikiran yang telah ia baca. Sehingga banyak orang yang melihat Freire dari berbagai perspektif, semisal orang katolik akan melihat ia sebagai seorang katolik yang berorientasi humanis, pun demikian orang marxis akan menganggapnya sebagai Marxis.²⁹ Karenanya, dalam BAB ini penulis akan menguraikan beberapa aliran yang mempengaruhi filsafat pendidikan Paulo Freire.

2.3.1 Teologi Pembebasan

Sebagaimana diketahui, Freire merupakan seorang yang lahir dan dibesarkan dengan tradisi iman Katolik. Ia menjalani kehidupannya sebagai seorang katolik meskipun sempat mengalami sebuah kegelisahan terhadap iman Katoliknya, dan akhirnya kembali menemukan iman katoliknya sesuai dengan ajaran yang dikembangkan dari kerangka Teologi yang bersifat membebaskan.

Teologi pembebasan adalah varian dari teologi yang berkembang pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada akhir tahun 1960-an. Teologi ini lahir sebagai sebuah hasil dari konferensi para uskup di Amerika latin yang mencoba membahas tanda-tanda zaman seperti yang dimaksudkan dalam Konsili Vatikan II tentang penderitaan dan nasib kaum miskin, yang menjadi mayoritas penduduk

²⁸ Sebuah konsep dari sebuah tempat lain, tidak bisa dengan begitu saja diterapkan pada wilayah yang berbeda, tanpa proses penjabaran terlebih dahulu untuk menjadi gagasan yang cocok dalam menjawab permasalahan masyarakat setempat. A. Agus Nugroho. *Op. Cit.* hlm 20.

²⁹ *Ibid*, Hlm 21.

Amerika Latin , dan kerinduan mereka akan pembebasannya.³⁰ Disamping itu, teologi ini pun memiliki fungsi yang mencoba memberikan terobosan untuk :

1. Membebaskan manusia dari ancaman globalisasi
2. Menghindarkan manusia dari berbagai dosa sosial
3. Menawarkan paradigma baru untuk memperbaiki sistem sosial bagi manusia yang telah dirusak oleh berbagai sistem ideologi dan perbuatan manusia itu sendiri.³¹

Teologi pembebasan ini, merupakan teologi yang diusung para agamawan di Amerika Latin yang hendak melawan para penguasa yang bersandar pada teologi pembangunan, yakni teologi yang menggunakan konsep teologi Barat modern yang mencoba menawarkan model pembangunan yang sejatinya tak pernah bersinggungan dengan kondisi kaum miskin yang ditindas. Model pembangunan yang disokong oleh Negara ini, kemudian di dukung oleh militer dan institusi agama yang semata-mata menjadi alat legitimasi untuk kepentingan Negara.³²

Konsep pembebasan yang ada dalam teologi ini, menurut Guastavo Gutierrez dimaksudkan sebagai sebuah refleksi yang berangkat sekaligus dari kitab suci dan pengalaman para manusia yang ada di Amerika Latin, yang hidup dalam penindasan dan perampasan haknya, dan karena itu merasa tertuntut untuk ikut serta dalam proses pembebasan.³³ Dalam teologi ini pun, konsep pembebasan dimaksudkan sebagai sebuah proses yang memungkinkan setiap individu yang terbelenggu dan tertindas untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya sebagai

³⁰ Sindhunata. *Teologi Pembebasan* dalam Majalah Basis No 03-04 edisi Teologi Pembebasan, 2002, hlm 8.

³¹ Mohamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 114.

³² *Ibid*, hlm 114 .

³³ Sindhunata. *Log. Cit*, hlm 9.

individu dalam merealisasikan diri, tujuan hidup, pandangan politik, ekonomi dan kebudayaannya. Konsepsi tentang teologi ini, kemudian berkembang di Amerika Lain dan kemudian menjadi spirit yang mampu membakar semangat para teolog untuk mendorong terjadinya perubahan sosial yang selama ini dinanti-nantikan oleh kaum miskin yang ditindas oleh para penguasa di setiap Negara di Amerika Latin.

Pada titik inilah, Freire bertemu dan tak bisa dilepaskan dari proses perkembangan Teologi Pembebasan di Amerika Latin. Konsepsi dasar yang diperjuangkan oleh Freire sejatinya bersinggungan dengan konsep yang juga sedang dikembangkan oleh para agamawan kala itu. Karenanya menjadi sangat mungkin bila pada keduanya ada kesamaan tujuan, yakni pembebasan manusia dari hegemoni dan dominasi kelompok manusia yang lainnya, yang dapat menegaskan kebebasannya.

2.3.2 Marxisme

Konsepsi filsafat yang dilahirkan dari Freire adalah filsafat yang bersifat praksis, refleksi kritis dan aksi-refleksi, yang mengindikasikan bahwa kerangka filsafat yang dibangun oleh Freire bukanlah sebuah sistem filsafat yang jauh dan terpisah dari lingkungan konkritnya. Akan tetapi sebaliknya, yakni ingin masuk dan terlibat dalam usaha untuk terus menerus melakukan pembaharuan terhadap dunia konkritnya. Berbanding lurus dengan konsepsi yang diusung Freire, keadaan Amerika Latin saat itu, dipenuhi oleh antagonisme dan kontradiksi antara golongan kaya dan golongan miskin, serta golongan menindas dan golongan ditindas. Dalam kondisi yang demikian, pemikiran dialektika dari tradisi kaum Marxis, biasanya digunakan sebagai sebuah metode gerakan dan alat analisa sosial yang bisa memberikan jawaban terhadap kondisi yang ada.

Dalam kondisi ini, Marxisme bisa dilihat dari kerangka filsafat yang mencoba mengkritisi keadaan yang ada pada saat itu. Konsepsi dialektika Marx menjadi salah satu inti pemikiran yang mempengaruhi sistem filsafat pendidikan Freire yang jatuh kepada praksis aksi-refleksi. Terjadi sebuah kesalahfahaman dalam memahami konsepsi dialektika, yakni selalu dipahami sebagai sebuah

doktrin partai komunis,³⁴ dan Freire sendiri tidak terjebak dengan hal itu, ia memahami dialektika dalam dua pandangan, yakni dia mengkonsepkan realitas sebagai hal yang dialektis serta dia sendiri pun berdialektika dalam cara pandangnya tentang analisa sosial.³⁵ Akan tetapi konsep yang ini sebenarnya berawal dari Hegel ini, melihat bahwa selalu terjadi kontradiksi antara setiap unsur dalam kehidupan. Pada posisi ini, setiap unsur memiliki potensi yang baik dan buruk, karenanya dalam proses dialektika setiap unsur selalu bersifat netral, setelah itu setiap unsur tersebut harus saling menegasikan untuk menghasilkan unsur yang lebih baik, dan inilah yang disebut dengan dialektika. Pada proses dialektika ini, unsur kritis tumbuh sebagai sebuah refleksi atas proses menjadi sadar.³⁶

Berbeda dengan Hegel, Marx mengembangkan konsep dialektika tersebut pada wilayah materialisme yang diamininya, dalam membaca proses sejarah. Konsep tersebut kemudian ia kembangkan dalam kaitannya dengan dunia keseharian. Konsepsi kritis yang hadir pada dialektika Hegelian yang bersifat abstrak kemudian dia tarik pada wilayah yang konkret. Dari sinilah konsep aksi-refleksi hadir dalam pemikiran Paulo Freire.

Selain itu, konsepsi yang diambil oleh Freire dari Marxis adalah konsep perjuangan kelas. Konsep perjuangan kelas merupakan sebuah konsepsi taktis dan politis yang dihadirkan dalam teori marxis sebagai sebuah radikalisasi konsep dari teori materialisme dialektik. Konsep perjuangan kelas Marx melihat bahwa dalam sebuah situasi yang dianggap adil sebenarnya tersembunyi ketidakadilan, sehingga perlu dirumuskan sebuah tawaran baru untuk merubah situasi yang sedang terjadi. Dalam posisi ini, konsep tersebut menjadi semacam alat analisa bagi Freire untuk membongkar situasi yang sedang terjadi untuk kemudian ia rumuskan sebuah

³⁴ Etienne Balibar. *The Philosophy of Marx*. London & New York : Verso. 2007. hlm 3.

³⁵ Peter Roberts. *Education, Literacy and Humanization : Exploring the Work of Paulo Freire*. London : Bergin & Garvey. 2000. hlm 35.

³⁶ Mohamad Fuad. *Op. Cit.*, Hlm 120.

jalan baru yang dapat merubah situasi dan kondisi yang dialami oleh rakyat Brazil.

2.3.3 Eksistensialisme

Kerinduan Paulo Freire terhadap keotentikan pendidikan, dianggap sebagai sebuah pengaruh eksistensialisme terhadapnya. Kerinduan ini merupakan sebuah manifestasi dari kebutuhan dan kebebasan pribadi setiap individu. Dalam posisi ini, manusia ingin “mengada bagi dunianya sendiri” dan bukan ingin “mengada bagi orang lain”.³⁷ Pun demikian, bahwa posisi ini sangatlah sejalan dengan keinginan manusia untuk melakukan “tindakan nyata mengetahui” serta terhadap kebebasannya setiap individu.³⁸

Dalam hal ini, “tindakan nyata mengetahui” merupakan sebuah proses gerak kesadaran yang mencari keutuhan pengetahuan. Freire menganggap bahwa mengetahui merupakan sebuah pencarian alasan eksistensi sebuah objek atau fakta. Karenanya, pengetahuan merupakan sebuah hal yang niscaya tak pernah komplit dan selalu dalam proses menjadi, sehingga mengetahui adalah proses pencarian yang permanen.³⁹

Pencarian ini kemudian menekankan adanya sebuah interaksi, karena pengetahuan bagi Freire tidak bisa ditemukan hanya dalam hal-hal abstrak dan aktivitas individual tapi dalam hubungan komunikasi yang aktif (dialog) dengan yang lainnya.⁴⁰ Pekenan Freire pada konsepsi dialog secara konseptual merupakan sebuah penegasan sejauh mana Freire menjunjung Intersubyektivitas.⁴¹ Interseubyektivitas dengan sendirinya membuka ruang-ruang komunikasi yang

³⁷ *Ibid*, hlm 122.

³⁸ Denis Collins. *Paulo Freire : Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*. Diterjemahkan oleh Henry H dan Anastasia P. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002. hlm 58.

³⁹ Peter Roberts. *Op. Cit.* hlm 38.

⁴⁰ *Ibid*. hlm 39.

⁴¹ Denis Collins. *Op. Cit.* hlm 58.

dialogis dalam proses tindakan nyata mengetahui yang bersandar pada kebebasan individu dalam memilih dan memaknai proses pendidikannya.

2.3.4 Fenomenologi

Fenomenologi adalah upaya hati-hati dalam mendeskripsikan hal-ihwal sebagaimana mereka menampakan diri ke dalam kesadaran,⁴² karenanya fenomenologi selalu menekankan bahwa kesadaran merupakan prasyarat untuk memahami realitas. Pada posisi ini, konsientisasi yang dikembangkan dalam filsafat pendidikan Freire, merupakan sebuah konsep fenomenologis yang bermakna proses transformasi kesadaran subjek yang pasif menjadi aktif dalam mekanismenya menjalani kehidupan.

Dalam proses mengetahui, posisi kesadaran memainkan peranan penting. Hal ini terkait dengan bagaimana subjek atau manusia itu sendiri dalam mengeksplorasi proses pencarian pengetahuannya. Disisi lain, kesadaran ini juga berguna dalam membaca posisinya, artinya pemetaan tentang keberadaan serta kondisi kesadaran ini memungkinkan untuk memahami lebih dalam tentang posisinya dalam realitas.

2.4 Konsep Pendidikan Paulo Freire

Freire dalam bukunya yang berjudul *Pedagogy of Freedom*, menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tindakan manusia yang spesifik dalam mengintervensi dunia.⁴³ Akan tetapi, konsep pendidikan Freire, sejatinya tergambar jelas dalam buku *Pedagogy of The Oppressed*, yang mencoba menerangkan bagaimana posisi pendidikan sebenarnya. Freire menggambarkan bagaimana pendidikan menjadi alat untuk membebaskan kondisi ketertindasan

⁴² Donny Gahral Adian. *Percik Pemikiran Kontemporer : Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta : Jalasutra. 2006. hlm 140.

⁴³ Paulo Freire. *Pedagogy of Freedom : Ethics, Democracy, and Civic Courage*. Lanham, Md : Rowman and Littlefield. 1998. hlm 99.

manusia menuju kebebasannya. Pada posisi ini, Freire mengemukakan pemikirannya sebagai berikut :

2.4.1 Pendidikan Tidak Bisa Dipisahkan dari Aspek Politik

Pendidikan bagi Paulo Freire, merupakan sesuatu yang politis. Hal ini karena pendidikan selalu melibatkan hubungan sosial dan melibatkan pilihan-pilihan politik. Keterkaitan kondisi ini mengakibatkan bahwa pendidikan mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan sosial. Pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire sejatinya merupakan pendidikan yang kritis, yakni pendidikan yang mencoba mengkritisi problem sosial yang ada dan selanjutnya memformulasikan tata hubungan sosial yang baru. Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Freire, sejatinya menekankan pendidikan sebagai sebuah metode menuju kehidupan yang jauh lebih beradab yakni dengan menghilangkan posisi penindasan yang menegaskan arti penting dan menghalangi manusia untuk menjadi manusia yang lebih utuh.

Pada posisi ini, Freire menekankan bahwa pendidikan sangatlah berelasi dengan situasi politik yang ada. Freire mempertegas hal ini dengan menekankan bahwa kondisi pembelajaran dan pendidikan yang terjadi dalam kelas memperlihatkan posisi politis dari seseorang guru yang mengajarnya. Kondisi ini kemudian akan memperlihatkan bagaimana situasi politik yang dibangun berelasi sejalan dengan bagaimana kondisi pendidikan yang dibangun.

2.4.2 Pendidikan Sebagai Proses Penyadaran (Konsientisasi)

Selain mengintegrasikan—dalam istilah yang digunakan Freire-politik dan pendidikan, Freire melihat bahwa pendidikan merupakan sebuah alat penyadaran. Artinya bahwa pendidikan yang ditawarkan harus mampu membawa peserta didik untuk keluar dari sebuah kesadaran yang semu, yakni kesadaran yang magis. Freire melihat bahwa kesadaran yang magis ini tidak mampu membawa perubahan sosial yang berarti, karenanya peninggkatan atau penyadaran merupakan sebuah tugas yang diemban oleh pendidikan.

Taraf ini menegaskan bahwa, pendidikan yang ada haruslah merupakan sebuah aksi cultural, yakni sebuah aksi yang ditujukan untuk mendemitologikan mitos yang dikembangkan oleh para penguasa yang dicekoki atau ditransmisikan pada kesadaran magis. Pada kondisi ini, penyadaran berlangsung sebagai sebuah prosedur yang akan melahirkan dengan sendiri kesadaran kritis itu, karena jika proses penyadaran dan kesadaran kritis itu ditransmisikan, maka kemudian hal tersebut bisa dimistifikasi menjadi mitos ideologis.⁴⁴

Konsientisasi merupakan sebuah proses yang dihadirkan dalam pendidikan Freire. Pada proses ini, kesadaran subjek atau peserta didik diajak secara bersama-sama untuk bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya, mulai dari tahap magis, naif sampai akhirnya menuju kritis.⁴⁵ Sehingga dari tahapan ini, rumusan pendidikan kemudian akan semakin bergerak menuju proses selanjutnya yakni menuju kearah pendidikan sebagai sebuah proses humanisasi diri.

2.4.3 Pendidikan Merupakan Proses Humanisasi

Freire mendictumkan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses humanisasi, yakni sebuah proses untuk “menjadi manusia”. Hal ini didasari oleh pemikirannya tentang semua hal yang bersifat “menjadi”. Karena bagi Freire, seseorang itu tidak pernah bisa menjadi manusia utuh, tapi menjadi manusia yang lebih utuh. Yakni manusia memang tidak dilahirkan dengan sempurna karenanya ia harus hidup dalam dan dengan setiap perubahan yang terjadi di dunia.⁴⁶

Humanisasi merupakan sebuah kondisi yang sejatinya harus ada dalam setiap hal, tak terkecuali pun dalam pendidikan. Freire melihat bahwa pendidikan yang ada, tak pernah menekankan arti penting dari humanisasi. Akan tetapi malah sebaliknya, yakni pendidikan malah menjadi alat dehumanisasi yaitu dengan tetap

⁴⁴ Paulo Freire. *The Politics Of Education*. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dan Fuad A .Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002. hlm 152.

⁴⁵ Peter Roberts. *Op. Cit.* hlm 138.

⁴⁶ *Ibid.* hlm 41.

membuat peserta didik berada dalam posisinya sebagai makhluk yang tertindas dan melanggengkan situasi penindasan.

Proses humanisasi dalam kerangka Freire mengindikasikan adanya transformasi kondisi, yakni transformasi kondisi sosial dari ketertindasan menuju pembebasan. Pada titik ini, humanisasi merupakan sebuah tindakan politis, karena humanisasi tidak hanya bertumpu pada perubahan yang bersandar pada diri seseorang, akan tetapi juga pada perubahan kondisi yang lainnya.⁴⁷ Karenanya konsep pendidikan yang berbasis pada humanisasi merupakan sebuah pencarian yang terus menelisik apakah kondisi kita sudah menjadi manusia, yaitu manusia yang hidup dalam praxis,⁴⁸ yakni praxis yang revolusioner atau praxis yang mengindikasikan adanya transformasi sosial dari kondisi tertindas menuju keterbebasan dari penindasan.

2.4.4 Pendidikan Hadap Masalah dan Dialog sebagai Metode Humanisasi

Sebagai proses humanisasi, pendidikan tentunya harus memiliki metode yang mampu menopang proses tersebut. Karena konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Freire berbeda dengan konsep pendidikan yang ada, tentunya metode yang digunakan oleh Freire pun akan berbeda jauh dengan metode pendidikan yang dilawannya. Karenanya dalam konsep pendidikan yang humanis ini, Freire menekankan beberapa hal yang penting sebagai sebuah prosedur untuk menuju pada proses menjadi manusia yang lebih utuh.

Hal pertama yang Freire tekankan adalah pada metode pendidikan yang digagasnya. Freire menekankan bahwa metode yang ada dalam sistem pembelajaran terjebak untuk membuat peserta didik stagnan dan tidak mampu membuka diri serta menyelesaikan problem yang dia hadapi. Karenanya bagi Freire, pendidikan haruslah mampu menuntaskan problem, yakni dengan membuat peserta didik berhadapan langsung dengan masalah itu.

⁴⁷ Stanley Aronowitz, *Paulo Freire's Radical Democratic Humanism* dalam *Paulo Freire : a Critical Encounter*. London & New York : Routledge. 1993. hlm 13.

⁴⁸ Peter Roberts. *Op Cit*. hlm 43.

Pada tarap ini, Freire mengembangkan konsep pendidikan “Hadap Masalah” yakni konsep pendidikan yang berhadapan langsung dengan masalah, yang juga sebagai sebuah antitesa terhadap konsep pendidikan yang Freire sebut sebagai “Pendidikan Gaya Bank” atau konsep pendidikan yang menganggap peserta didik sebagai tong kosong yang siap diisi dengan ilmu pengetahuan yang telah disiapkan.⁴⁹ Pendidikan jenis ini akan tetap membuat situasi tidak berubah atau akan dapat menghadang terjadinya transformasi. Karenanya “pendidikan gaya bank” kemudian harus digantikan dengan pendidikan “hadap masalah” yang justru mampu membawa peserta didik membuat sebuah transformasi dan secara aktif membahas serta menanyakan dan menyelesaikan problem yang terjadi.

Selanjutnya, pendidikan yang menghadirkan masalah ini kemudian akan membawa posisi subjek atau peserta didik untuk berhadapan langsung dengan problem *real* yang sejatinya ada dihadapan mereka. Pada taraf ini kemudian setiap individu akan terlibat aktif dalam upaya untuk menanggapi masalah tersebut, yakni dengan masuk kedalam masalah itu dengan cara dan kemudian berkomunikasi dengan yang individu yang lainnya untuk menuntaskan problem tersebut. Komunikasi yang terjadi antar individu kemudian menghadirkan metode baru, yakni metode dialog.

Metode dialog merupakan konsep selanjutnya dari prosedur menuju humanisasi. Dialog dalam pandangan Freire merupakan inti dari arti menjadi manusia, karena menurut Freire kita memanggap diri kita manusia justru melalui dialog dengan yang lain.⁵⁰ Konsep dialog yang dimaksudkan oleh Freire sejatinya adalah “Kata”. Konsep kata ini memiliki dua dimensi, yaitu : Refleksi dan Aksi, yang keduanya memiliki hubungan yang mendasar, yakni jika salah satu dikorbankan maka berubah pulalah “kata” tersebut.⁵¹

⁴⁹ Muhamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 35

⁵⁰ Peter Roberts, *Op. Cit.* Hlm 43.

⁵¹ Paulo Freire. *Pedagogy of The Oppressed.* New York : Seabury Press. 1970. hlm 75.

Kata yang sejati adalah praxis, dan hal itu akan mengubah dunia. Tanpa kata keberadaan manusia kemudian menjadi tidak mungkin. Mengada adalah menamai dan merubah, dan manusia yang mengada adalah manusia yang berada dalam kata, dalam karya dan dalam aksi-refleksi.⁵² Dalam filsafat moral Freire, praxis dan dialog adalah hubungan akhir. Manusia mencari tahu, memahami dan mentransformasikan dunia melalui komunikasi dengan yang lainnya, dan dialog yang sejati merepresentasikan sebuah bentuk dari praxis humanisasi.⁵³

Konsep praxis inilah yang kemudian menjadi dasar dari sistem dan metode pendidikan kaum tertindas, yang setiap waktu dalam prosesnya, pendidikan ini merangsang tindakan baru yang lebih baik. Demikian seterusnya, sehingga proses pendidikan merupakan suatu daur bertindak dan berpikir yang berlangsung terus menerus sepanjang kehidupan manusia.⁵⁴

Dari dua metode yang ditawarkan oleh Freire dalam konsep pendidikannya, sejatinya terkandung sebuah hakikat pendidikan, yakni pendidikan sebagai sebuah alat pembebasan menuju proses menjadi manusia yang lebih utuh. Hal ini lahir karena, dalam dua prosedur yang ditawarkan oleh Freire, merupakan sebuah antitesa terhadap situasi objektif yang terjadi dalam proses pendidikan yang pada akhirnya menjerumuskan peserta didik pada situasi yang tidak manusiawi atau dehumanis. Pada posisi inilah kemudian hakikat pendidikan Paulo Freire sering kali disebutkan sebagai Pendidikan Pembebasan.

2.5 Pendidikan Pembebasan dalam Pemikiran Paulo Freire

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Paulo Freire adalah seorang pemikir yang menyelami beberapa karya pemikir besar dan kemudian menghasilkan konsep pendidikannya sendiri. Pendidikan, dalam pengertian Freire haruslah bersifat membebaskan, otentik, serta menyadarkan. Konsep-konsep ini diambilnya

⁵² *Ibid.* hlm 76.

⁵³ Peter Roberts. *Op Cit.* hlm 44.

⁵⁴ Mohamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 50.

karena ia beranggapan bahwa proses transformasi sosial tidak dapat dimungkinkan terjadi jika para actor dalam transformasi itu tidak bebas dan tidak menyadari belenggu yang mengikatnya. Hal yang kemudian dirumuskan oleh Freire adalah bagaimana menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan. Pada posisi ini, Freire melihat bahwa pendidikan yang membebaskan akan berbanding lurus dengan peningkatan posisi setiap individu dalam lingkup kehidupannya.

Bagi Freire, pembebasan bukanlah sebuah proses psikologis, yakni bukanlah satu hal yang terjadi karena adanya pergeseran dalam kesadaran, tapi lebih dari itu. Pembebasan mengambil tempat dalam aksi transformasi manusia di dunia, yakni dalam kondisi kesejarahannya dan kondisi sosialnya. Karenanya pembebasan merupakan tindakan historis dan bukan tindakan mental. Dari posisi ini, pembebasan bagi Freire merupakan sebuah bentuk dari sikap kritis, dialogis, serta praxis yang diarahkan untuk mengatasi penindasan. Disamping itu, pembebasan dengan sendirinya mengandung kemerdekaan, karena bagi Freire pembebasan memerlukan kemerdekaan jika pembebasan itu ingin menjadi otentik.⁵⁵

Konsep pendidikan pembebasan yang diusung oleh Freire ini, berangkat dari situasi yang nyata, yakni bahwa di dunia ini terjadi sebuah proses ketidakadilan dimana sebagian besar atau mayoritas manusia menderita dan tertindas oleh sekelompok minoritas orang. Situasi ini disebut oleh Freire sebagai “situasi penindasan”.⁵⁶ Freire melihat bahwa penindasan merupakan sesuatu yang tidak manusiawi, karena penindasan dengan sendirinya menegasikan harkat dan derajat manusia. Kondisi ini kemudian menjadi dehumanis karena sang penindas dengan tegas menenggelamkan yang tertindas menuju pada “kebudayaan bisu”. Akan tetapi disisi lain, sang penindas pun masuk pada kondisi dehumanis, karena ia secara tak sadar menegasikan keberadaan hati nuraninya yang menolak penindasan dilakukan.

⁵⁵ Peter Roberts. *Op. Cit.* hlm 45-46.

⁵⁶ Muhamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 68.

Dari posisi inilah kemudian humanisasi menjadi sebuah inti dalam makna menghilangkan sekat dan belenggu yang selama ini menjadi pengikat. Freire beranggapan bahwa pada hakikatnya manusia adalah subyek yang penuh, dan karenanya situasi yang menegasikan kemanusiaan harus dihilangkan. Pandangan ini kemudian menghasilkan sebuah kerangka filsafat Freire tentang manusia.⁵⁷

Berangkat dari pandangannya tersebut, pendidikan sejatinya bisa menjadi alat pembebasan. Dalam kondisi ini, proses pendidikan bisa mengarahkan setiap individu yang terlibat didalamnya untuk mendapatkan kembali hakikat kemanusiaannya yang direngut oleh para penindas. Pada posisi ini, pendidikan berupaya memberikan bantuan untuk membebaskan manusia di dalam kehidupan objektif dari penindasan yang mencekik mereka,⁵⁸ dan juga dengan tegas memperlihatkan bahwa pendidikan haruslah terlepas dari kecenderungan akan proses hegemoni. Kecenderungan hegemonis inilah yang mengakibatkan adanya keterbelengguan manusia-manusia yang tertindas untuk tetap tidak sadar dengan kondisi yang dialaminya. Karenanya proses pendidikan yang membebaskan harus ditawarkan sebagai sebuah jalan keluar terhadap situasi ini.

Pendidikan pembebasan yang ditawarkan oleh Freire, mendasarkan dirinya pada daya kritis yang harus tumbuh pada setiap individu. Hal ini dikarenakan, daya kritis tersebut berguna untuk mengenali sebab-musabab penindasan yang menghilangkan kebebasan manusia.⁵⁹ Selain itu, daya kritis ini, berguna untuk memulihkan situasi kemanusiaan yang selama ini dinegasikan. Karenanya,

⁵⁷ *Ibid.* hlm 69.

⁵⁸ Paulo Freire. *The Politics Of Education. Op. Cit.* hlm 208.

⁵⁹ Paulo Freire dalam *Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan* dalam *Menggugat Pendidikan*, disunting dan diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi .Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001. hlm 438.

pendidikan pembebasan bermakna sebagai tindakan dan refleksi secara konsisten yang dapat menghindarkan terjadinya proses penindasan.⁶⁰

Pada posisi inilah, makna pendidikan bergerak menjadi sebuah praksis. Pendidikan seperti ini mengarahkan adanya aksi yang terus menerus sebagai sebuah proses berpikir dan bertindak. Proses inilah yang kemudian menghasilkan proses pendidikan yang berhadapan langsung dengan masalah yang dihadapinya. Pendidikan yang ditawarkan oleh Freire menjadi semacam alternatif, dimana pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan, serta pendidikan yang bertujuan untuk mengkaji realitas dengan bertumpu pada aksi-refleksi yang terus menumbuhkan kesadaran terhadap realitasnya dan hasrat untuk merubah kondisi yang menindas. Posisi inilah yang kemudian disebutkan sebagai makna dan hakikat praksis.⁶¹

Praxis ini pulalah yang secara tak sadar menghadapkan kesadaran manusia pada situasi yang objektif yang harus dihadapi olehnya. Sehingga, pada posisi ini, kesadaran manusia memainkan peranan yang cukup penting dalam mereformulasikan pengetahuan yang lama menjadi pengetahuan yang baru.⁶² Disisi lain, kesadaran manusia hadir bersama *dengan* pendidikan dan bukan hadir *untuk* pendidikan. Posisi ini pula yang mengarahkan Freire pada pengakuan dan pentingnya proses penyadaran atau yang ia sebut sebagai konsientisasi. Konsientisasi dalam hal ini bermakna sebagai sebuah proses yang didalamnya manusia berpartisipasi secara kritis dalam proses perubahan.⁶³ Karenanya, tidak ada perubahan tanpa konsientisasi, dan tidak ada konsientisasi tanpa adanya kesadaran kritis.

⁶⁰ Paulo Freire. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Diterjemahkan oleh Utama Dananjaya. Jakarta : LP3ES 2008. hlm 61.

⁶¹ Mohamad Fuad. *Op Cit*. hlm 75.

⁶² Paulo Freire. *The Politics Of Education*. *Op Cit*. hlm 192.

⁶³ *Ibid*. hlm 183.

Hal demikian tidak bisa dipungkiri karena kesadaran kritis melihat dunia bukan sebagai sebuah entitas yang statis, akan tetapi sebuah hal yang dinamis yang memungkinkan kesadaran untuk terlibat aktif didalamnya. Disinilah, konsientisasi berada, yakni sebagai hasil dari terlibatnya kesadaran kritis dalam memandang dunia dengan berbagai macam problem yang hadir didalamnya.

Karenanya, proses pendidikan pembebasan yang ditawarkan oleh Freire menekankan bahwa pembebasan hanya berjalan dengan sungguh-sungguh jika seseorang memang benar-benar telah menyadari realitas dirinya dan dunianya sendiri,⁶⁴ dan hanya manusia yang mempunyai kemauan yang bisa membebaskan dirinya, dan semua itu merupakan refleksi yang akan menghasilkan perubahan di dunia dan bukan sekedar kesadaran semu.⁶⁵ Karenanya, pada akhirnya Freire menyatakan bahwa pembebasan merupakan tugas yang paling fundamental yang harus dilaksanakan di akhir abad ini.⁶⁶

Adapun konsep tentang proses pembebasan individu dalam pendidikan, akan dibahas pada bab selanjutnya, yakni pada bab 3.

⁶⁴ Mohamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 76.

⁶⁵ Paulo Freire. *The Politic of Education. Op. Cit.* hlm 124.

⁶⁶ Peter Roberts. *Op. Cit.* hlm 48.

BAB 3

PROSES PEMBEBASAN INDIVIDU DALAM PENDIDIKAN

3. 1 Aku sebagai Individu yang Otonom

Pembahasan subbab ini akan langsung dijelaskan dalam empat subsubbab selanjutnya. Subsubbab tersebut, saya bagi pada pembahasan mengenai menyoal individu, individu sebagai manusia ideal, individu sebagai manusia tertindas, dan individu sebagai manusia bebas.

3. 1. 1 Menyoal Individu

Berbicara tentang satuan terkecil dalam unsur kehidupan masyarakat, tentunya akan membawa kita pada individu. Berbincang tentang individu pun, sebenarnya tengah mengarahkan kita pada pembicaraan tentang bagian terpenting penggerak kehidupan bermasyarakat. Bergerak dari hal tersebut, maka berbincang tentang individu merupakan perbincangan yang mendasar dalam mengkaji struktur sosial kehidupan.

Pun demikian dalam pendidikan, berbincang tentang individu sejatinya tengah mengarahkan kita pada pembicaraan tentang konsep pendidikan yang nantinya akan melibatkan individu dalam prosesnya. Hal ini kemudian akan membawa kita pada proses pelacakan posisi individu dalam kaitannya dengan pendidikan.

Akan tetapi, yang kemudian menjadi masalah awal adalah apa yang sebenarnya dimaksud dengan individu? hal ini merupakan dasar yang cukup penting dalam melacak problem yang kemudian lahir. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan tahun 2007, individu berarti organisme yang berdiri sendiri yang secara fisiologis bebas dan tak mempunyai ikatan dengan yang lainnya.

Dalam tradisi filsafat, konsep tentang individu sering kali dipahami dari kerangka filsafat sosial dan politik, hal ini biasanya langsung dikaitkan dengan problem hak maupun kewajiban yang ada pada individu terkait dengan hakikatnya

sebagai *zoon politicon a la* Aristotelian, dan hal ini kemudian yang selalu menjadi patokan dalam pembicaraan tentang konsep individu. Akan tetapi, yang dimaksudkan dengan individu dalam hal ini, adalah dari kerangka filsafat manusia. Sehingga pembahasan tentang individu yang kemudian dimaksud adalah diri manusia itu sendiri, tetapi dalam pembatasan satuan atau dalam cakupan yang paling kecil.

Akan tetapi, sejalan dengan konsep individu dalam tradisi Aristotelian, pembahasan selanjutnya dalam permasalahan ini pun, kerangka individu beranjak dari hal yang sama, yakni dalam pemosisian individu yang kaitannya dengan hak dan kewajibannya dalam proses belajar atau dalam pendidikan. Hal ini, kemudian yang akan menjadi inti dari pembahasan tentang posisi individu dalam kaitannya dengan dan dalam pendidikan pembebasan. Dalam hal ini pula, posisi individu menjadi penting karena dalam proses pendidikan yang ada, individu tak pernah ditempatkan dalam posisinya sebagai subjek yang berkesadaran akan tetapi sebaliknya, sehingga pemosisian individu bermakna sebagai penempatan individu sebagai subjek yang berkesadaran dalam proses pendidikan.

Sebelum lebih lanjut membahas tentang posisi individu dalam pendidikan, terlebih dahulu akan dibahas tentang konsep individu dalam tradisi filsafat manusia.

3.1.2 Individu sebagai Manusia Ideal

Sebagaimana telah disebutkan di atas, konsep individu yang dimaksudkan dalam BAB ini adalah manusia dalam cakupan yang paling kecil. Dalam hal ini, permasalahan tentang konsep manusia sejatinya telah dimulai pada zaman Yunani Kuna. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, konsep itu dilupakan dan seolah hilang saat filsafat mengalami kemunduran pada abad pertengahan. Konsepsi tentang manusia ideal, hilang dan tak berjejak, karena doktrin gereja membungkam sisi kemanusiaan dan menenggelamkannya dalam problem pembahasan yang selalu berkaitan dengan dosa, Tuhan, dan agama.

Pada tahap ini, pemikiran tentang manusia ideal seolah tak ditemukan. Hingga paham humanisme datang menghampiri pikiran-pikiran manusia Eropa,

melalui daerah sisi selatan Italia, yakni dari pulau Sisilia. Humanisme datang sebagai cikal bakal pembangkit kesadaran dan konsep tentang manusia ideal.

Humanisme, bisa dipahami dari dua sisi, yakni dari sisi historis dan sisi aliran filsafat. Dari sisi yang pertama, humanisme dipahami sebagai gerakan intelektual dan kebudayaan, dan dari sisi yang kedua, humanisme dipahami sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, sehingga manusia menempati posisi yang sentral dan penting.⁶⁷ Pokok pikiran pada sisi yang kedua adalah yang diyakini menjadi patokan dari konsep manusia yang diamini pada abad renaissance, yang kemudian menghadirkan semangat antroposentrisme.

Dalam prosesnya, humanisme mencoba menarik posisi dan pikiran manusia yang dibeleggu dogma dan kekuasaan melalui konsep pendidikan “*artes liberales*” atau lebih dikenal dengan pendidikan liberal yang memiliki dua bagian yakni *trivium* dan *Quadrivium* yang diklaim layak bagi orang-orang merdeka supaya mereka mencapai keutamaan dan kebijaksanaan.⁶⁸ *Trivium* berisi dengan gramatika, logika, dan retorika. Sementara *Quadrivium*, berisi matematika, geometri, astronomi dan seni.

Pada tahapan ini, manusia hendak diberikan haknya sebagai individu yang bebas. Disini, kebebasan dipahami sebagai tahapan ideal yang harus ada pada manusia, akan tetapi kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang berkarakter manusiawi yakni kebebasan manusia dalam batas-batas alam, sejarah, dan masyarakat.⁶⁹

Diktum tentang manusia ideal dalam zaman renaissance tersebut, menandakan bahwa manusia adalah *faber mundi* atau pekerja dan pencipta dunianya. Pada titik ini, kreativitas dan akal budi manusia kemudian mengarahkan

⁶⁷ Zainal Abidin. *Filsafat Manusia : Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2002. hlm. 25.

⁶⁸ Bambang Sugiharto (ed). *Humanisme dan Humaniora : Relevansinya Bagi Pendidikan*. Yogyakarta : Jalasutra. 2008. hlm 48.

⁶⁹ Zaenal Abidin. *Op Cit*. hlm 27.

manusia untuk menjadi sentral dari sistem semesta. Sehingga, antroposentrisme lahir sebagai konsekuensi logis dari tema kebebasan yang diusung oleh humanisme renaissance untuk mendentumkan konsep manusia idealnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, konsep ini juga banyak didebat oleh beberapa tokoh filsafat, semisal Rene Descartes yang lebih menekankan konsep manusianya pada dualisme tubuh dan jiwa, atau Arthur Schopenhauer yang melihat esensi hidup manusia adalah kehendak buta. Tapi bagaimana pun, konsep manusia ideal yang diusung kaum humanisme renaissance inilah yang dianggap paling bisa merepresentasikan apa tujuan sesungguhnya menjadi manusia, yakni menjadi bebas dan menjadi sentral kehidupan. Hingga, tak salah tentunya kalau pemikiran manusia ideal gaya humanisme renaissance ini, kemudian juga mendapat afirmasi dan pengukuhan teorinya pada pemikiran Jean-Paul Sartre yang hidup beberapa abad setelah renaissance hadir.

3.1.3 Individu sebagai Manusia Tertindas

Jika konsep individu sebagai manusia ideal menekankan pada posisi kebebasan dan penempatannya sebagai sentral, maka tak bisa kita bantah bahwa dalam perjalanan sejarah manusia, individu sering juga ditenggelamkan pada situasi yang akhirnya memaksanya menjadi budak. Posisi pembudakan ini, sejatinya merupakan sebuah kondisi yang tak bisa kita pungkiri. Karena hingga abad 20, pembudakan terhadap manusia tetap saja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Sejalan dengan konsep pembudakan, maka yang sebenarnya terjadi adalah proses penindasan, atau proses penguasaan individu untuk ditindas oleh kelompok yang berkuasa. Proses penindasan yang terjadi dalam hal ini, bukan hanya terjadi secara fisik dan kasatmata saja, akan tetapi juga terjadi melalui jalur yang tidak terlihat yakni melalui kerangka ideologis yang disusupkan dalam tindakan-tindakan yang bersifat psikologis atau program-program yang dengan jelas menggiring individu tetap pada jalurnya sebagai manusia yang tertindas.

Pada tahapan ini, posisi individu diajak untuk kembali masuk pada dunia yang ditata oleh sekelompok orang atau penguasa, seperti yang terjadi pada abad

pertengahan. Yakni menjadikan manusia kembali pada tahap *viator mundi* atau peziarah dunia yang tidak memiliki kuasa atas dirinya dan kebebasannya, karena akal budi dan kreatifitasnya hilang atau sengaja dihilangkan oleh tata aturan.

Di sinilah, posisi individu menjadi terkungkung. Freire menyebutkan bahwa manusia berbeda dengan binatang yang selalu harus beradaptasi dengan lingkungannya sebagai bukti ketidakberdayaannya menghadapi realitas. Dan disinilah penindasan itu terjadi, yakni dengan tetap membuat individu tidak mampu berpikir kritis terhadap situasi dan kondisi yang terjadi disekelilingnya, dan malah menjerumuskan dia untuk ikut berubah dan bukan merubah situasi yang ada.

Proses seperti ini, mengindikasikan terjadinya penindasan terhadap individu. Yakni dengan membuatnya tetap bungkam dengan kehilangan daya kritis dan kemampuannya berkreasi dalam menghadapi realitasnya.

Individu yang tertindas, bukanlah manusia yang menguasai dirinya. Hal ini karena mereka tidaklah memiliki hak atas dirinya, ada pokok aturan atau ketetapan sebuah kelompok tertentu yang memaksa sang individu untuk tidak dapat mengakses hak-hak yang dimilikinya. Dalam hal ini, terjadi sebuah tradisi baru yakni tradisi penindasan dengan menenggelamkan individu dalam sebuah kebudayaan dan kebiasaan bisu. Kebisuan inilah yang kemudian menjadi ciri yang mengindikasikan terjadinya sebuah penindasan pada individu.

3.1.4 Individu sebagai Manusia Bebas

Berbeda dengan individu sebagai manusia tertindas, individu sebagai manusia bebas memiliki karakter seperti yang digambarkan dalam tradisi humanisme renaissance, yakni individu yang memiliki hak atas dirinya dan juga individu yang menempatkan dirinya sebagai penguasa atas kehidupannya sebagai manusia di dunia.

Individu dalam pandangan ini, memiliki kebebasan dalam mengkreasikan segala sesuatu, dan dalam kreasinya terkandung tanggungjawab baik bagi dirinya

maupun orang lain. Pada titik ini, posisi individu yang bebas hampir sesuai dengan tawaran konsep manusia dalam pandangan Sartre.⁷⁰

Dalam hal ini pun, Freire melihat bahwa kebebasan adalah sebuah fitrah manusia. Freire sepakat dengan pandangan kaum eksistensialis yang melihat bahwa manusia adalah penguasa atas dirinya. Disisi ini, Freire menegaskan bahwa individu harus mampu menjadi pencipta sejarahnya sendiri, dan hal itu hanya dimungkinkan jika seseorang mampu menguasai dirinya untuk kemudian mampu memproyeksikan rancangan tentang dunia yang akan dibangun dan dihidupinya.

Manusia yang bebas, juga merupakan manusia yang memiliki kehendak. Artinya pada posisi ini individu bukanlah makhluk yang hanya dijejali dan didukung oleh patokan-patokan nilai serta aturan yang ditawarkan, akan tetapi merupakan individu yang mampu memberikan arahan pada dirinya untuk dapat menentukan setiap tindakannya, karena dengan kehendaknya, individu kemudian mampu membangkitkan tindakan-tindakan yang kemudian dapat mengarahkannya membentuk sebuah dunia baru yang akan dihidupinya juga.

Hal terakhir yang menegaskan individu sebagai manusia bebas adalah adanya tindakan yang diambil, jika individu hanya berhenti pada tahap menyakini kebebasan dan memiliki kehendak saja, maka situasi pembebasan tak akan pernah tercipta. Hal ini karena kebebasan hanya berhenti pada tahapan yang ideal, artinya perlu ada aksi yang kemudian mengarahkan individu untuk dapat menegaskan bahwa dirinya adalah manusia yang benar-benar bebas.

Hal inilah yang sejatinya diupayakan oleh Freire, dalam konsep pendidikan yang digagasnya. Freire menghendaki proses pembebasan bagi setiap orang secara umum, dan bagi individu secara khusus dalam pendidikan, yang dianggap menjadi alat pelanggeng penindasan.

⁷⁰ Fuad Hassan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*. Jakarta : Pustaka Jaya. 1973. hlm 127.

Akan tetapi sebelum masuk kedalam pembahasan mengenai proses pembebasan individu dalam pendidikan, sebelumnya akan dibahas tentang situasi yang menyebabkan individu tertindas dan harus dibebaskan.

3.2 Situasi Penindasan

Situasi penindasan merupakan sebuah situasi yang terjadi dalam masyarakat, yang bertujuan untuk tetap melanggengkan posisi dominasi dan hegemoni kekuasaan status quo terhadap objek-objek yang dikuasainya. Dalam hal ini, proses ini berlangsung dalam beberapa hal, salah satunya adalah melalui mekanisme pendidikan, yang membuat individu menjadi manusia yang membeo dengan penekanan ideologis yang mengindoktrinasi mereka agar menyesuaikan diri dengan kondisi penindasan ini.⁷¹ Proses seperti ini dilakukan dengan dua cara, yakni :

1. Pendidikan yang menindas
2. Masifikasi pendidikan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Pendidikan yang Menindas

Pendidikan sebagaimana telah dituliskan di atas, merupakan sesuatu hal yang tak bisa dipisahkan dari politik. Hal ini kemudian menempatkan pendidikan sebagai sebuah instrument yang kemudian bisa menjadi alat hegemoni kesadaran yang sifatnya positif maupun negatif terhadap setiap individu yang masuk kedalam wilayah ini. Pada posisi yang negatif, pendidikan kemudian menjadi mesin penghalusinasi yang cukup signifikan. Artinya bahwa pendidikan dalam posisi ini mampu mengelabui setiap individu yang terlibat, untuk terbuai dengan tawaran dan nilai yang diusung didalamnya. Hal demikian kemudian akan semakin menenggelamkan kesadaran individu ataupun peserta didik lainnya,

⁷¹ Paulo Freire. *Pedagogy of The Oppressed*. New York : The Seabury Press. 1970. hlm 65.

untuk tetap berada bualan dan hasutan yang terkandung dalam nilai dan kampanye ideologi yang sedang dihembuskan melalui pendidikan.

Pada tahap ini, pendidikan mewujudkan dirinya sebagai alat penindasan, yang bekerja dengan cara menjadi alat penakluk kesadaran. Pada posisi ini, penaklukan dijalankan dengan mekanisme memitoskan dunia, hal ini bertujuan untuk menyajikan dunia palsu bagi pikiran subjek atau individu yang sedang menjalani proses belajar.⁷² Proses ini kemudian berjalan dengan cara memberikan bujukan yang halus agar individu yang masuk kedalam pendidikan terbuai untuk menerima mitos propaganda.⁷³ Pada saat itulah, perubahan pandangan dan pengetahuan peserta didik yang sejatinya berbeda saat sebelum mereka belajar, kemudian dibengkokkan supaya sama atau menjadi tidak sesuai lagi dengan yang mereka pahami dan ketahui sebelumnya.

Selanjutnya, proses pembengkokan pengetahuan maupun pemitosan dan pengilusian, merupakan mekanisme yang ditempuh guna tetap melanggengkan situasi penindasan maupun mempertahankan status quo. Dalam hal ini, proses-proses tersebut dihadirkan guna menjalankan prosedur yang disebut sebagai invasi kultural.

Invasi kultural, demikanlah sesungguhnya yang terjadi dalam proses pendidikan. Merupakan sebuah mekanisme yang hadir setelah proses ekstensi berjalan dalam pendidikan. Proses ekstensi itu sendiri, bertujuan mendomestikasikan pengetahuan melalui proses patronism yang memungkinkan setiap individu yang belajar tergantung pada seseorang yang mengajarkan pengetahuan, dan setelah itu membuat pemahaman individu yang belajar tertumpu menjadi tak mandiri, artinya pada posisi ini, invasi kultural lebih lanjut berarti bahwa letak keputusan untuk bertindak bagi mereka yang diinvasi tidak pada

⁷² *Ibid.* hlm 135.

⁷³ Mohamad Fuad. *Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Sosial : Telaah Filosofis terhadap Filsafat Pendidikan Paulo Freire*. Tesis pada Program Pascasarjana Departemen Filsafat FIB UI. Depok. 2003. hlm 172.

mereka sendiri, akan tetapi pada yang menginvasinya.⁷⁴ Pada titik inilah, sejatinya kesadaran kritis setiap individu yang belajar kemudian mati dan tenggelam dalam pola invasi yang hegemonistik, yang memasukan kesadaran individu kedalam ruang pengetahuan yang terpisah dari realitas. Sehingga, kemampuan kritis individu untuk melihat problem yang sejati, menjadi kabur dan hilang. Dan pada posisi ini, invasi kultural kemudian bergerak untuk tetap mempertahankan posisi yang ada.

Selain itu, invasi kultural yang merupakan kepanjangan dari proses penindasan juga merupakan proses pengalienasian. Artinya pada posisi ini, setiap individu yang juga merupakan subjek dialienasikan untuk tidak menempatkan, mengamini ataupun mengangap subjek itu berkesadaran. Hal ini karena invasi dengan sendirinya membawa proses penegasian terhadap kesadaran-diri individu, dan mencoba menggantinya menjadi objek tak berkesadaran yang hanya bisa mengikuti. Setelah pandangan kritis dan kesadaran subjek kabur, pada posisi inilah pendidikan yang dijadikan sebagai alat invasi kultural bergerak pada tingkatan yang lebih lanjut, yakni pemupukan kesadaran naif dengan cara memasifikasikan pendidikan, atau menjadikan pendidikan sebagai alat kontrol supaya individu yang belajar tetap ada pada jalurnya sebagai individu yang tidak bebas dan berkesadaran.

3.2.2 Masifikasi Pendidikan

Masifikasi demikian Freire menyebutnya, merupakan sebuah kondisi dimana pendidikan telah berada dalam posisi kontrol. Dalam hal ini, masifikasi ada setelah para pendidik yang merupakan kepanjangan tangan dari ideolog yang membelenggu individu melalui invasi kultural dengan cara membuat kesadaran-diri setiap peserta didik hilang atau ternegasikan oleh kesadaran yang dibentuk oleh pandangan para pendidik.

Pendidikan, sejatinya adalah alat pembentuk kehidupan. Hal ini kemudian bermakna bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang amat krusial, karena

⁷⁴ Paulo Freire. *Op. Cit.* hlm 159.

pendidikan bersangkutan dengan hayat hidup semua orang. Akan tetapi pada prosesnya, pendidikan yang hadir adalah pendidikan yang sejatinya tak bersangkutan dengan hayat hidup semua orang, pendidikan pada proses ini menjadi semacam alat pembentukan masyarakat yang didominasi oleh kepentingan kaum penindas dan representasi mereka akan sebuah masyarakat yang jinak dan patuh.⁷⁵

Posisi ini kemudian semakin menenggelamkan individu pada posisi yang terpuruk, yakni ia kehilangan kesadaran kritisnya sebagai subjek yang seharusnya bisa melihat ada posisi yang salah. Selanjutnya ia pun teralienasikan dari kondisi dunia dan lingkungan yang sejatinya ia ingini. Pada kerangka ini, Freire menyatakan bahwa pendidikan harusnya mampu membuat manusia berani membicarakan masalah-masalah lingkungannya dan turun tangan dalam lingkungan tersebut.⁷⁶

Akan tetapi, apa yang dikehendaki oleh Freire, ternyata berbanding terbalik. Pendidikan, telah direduksi menjadi semacam alat kontrol yang hanya berguna bagi pemenuhan kebutuhan negara—yang dalam hal ini menjadi tempat bersemayamnya para ideolog pelanggeng status quo-. Pada posisi ini, pendidikan kemudian dimasifikasikan. Yakni pendidikan tidak mengorientasikan diri pada penciptaan kesadaran yang kritis, akan tetapi malah membuat kesadaran naif atau bahkan kesadaran mitis tetap ada atau bahkan menyebar luas. Masifikasi ini, kemudian semakin menjalankan fungsinya melalui propaganda, yang dilakukan guna mengkondisikan setiap individu supaya semakin patuh pada setiap nilai maupun ideologi yang dikembangkan oleh para penindasnya.

Sehingga pada akhirnya dalam kondisi yang demikian, tatkala individu masuk kedalam dunia pendidikan, sejatinya ia sedang tidak mencoba meraih impian maupun keinginannya, akan tetapi sebaliknya, yakni sang individu coba

⁷⁵ Mohamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 177.

⁷⁶ Paulo Freire. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan.* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh A. Agus Nugroho. Jakarta : Gramedia. 1984. hlm 34.

ditenggelamkan untuk menjadi manusia yang patuh dan mencoba untuk menghapus impian-impian yang dahulu ia miliki sebelum ia memasuki dunia pendidikan.

3.3 Masyarakat Tertutup sebagai Hasil dari Situasi Penindasan

Bersandar pada dua hal di atas, maka sesungguhnya hasil dari kerangka situasi penindasan ini adalah lahirnya masyarakat bisu yang tertutup, hal ini ditandai dengan munculnya tiga ciri utama, yakni :

1. Masyarakat berada pada cengkraman kolonialisasi yang memberikan status kepada mereka sebagai sang tertindas
2. Mereka tidak memiliki pengalaman demokratis, tetapi justru mengalami penindasan sebagai sesuatu yang benar-benar demokratis.
3. Mereka mewarisi dan melestarikan sistem feodalism yang justru menyuburkan status penindas dan tertindas.⁷⁷

Hal ini menjadi sebuah konsekwensi logis dari sistem yang diberlakukan, karena sistem tersebut menutup diri untuk bersentuhan dan berdialog dengan realitas. Situasi seperti ini jelas mengindikasikan adanya kesalahan, karena kesadaran setiap orang akhirnya tenggelam dan diarahkan menuju pemahaman yang salah tentang diri mereka sendiri, yakni melihat bahwa situasi seperti ini tidak bisa dirubah karena kesadaran mereka telah dibengkokan untuk menjadi diam.

Kondisi masyarakat seperti ini, jelas merupakan dambaan kaum penindas. Hal ini karena jika individu-individu dalam masyarakat dibiarkan menggapai kesadaran kritis, maka kontradiksi dan antagonisme yang mengarahkan pada transformasi sosial akan hadir sebagai konsekwensinya. Karenanya, untuk mencegah hal itu terjadi, maka para penindas akan tetap membiarkan setiap individu untuk tetap ada dalam kondisi ketertindasan, yakni dengan tetap

⁷⁷ Mohamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 87.

melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggengkan situasi penindasan tersebut.

3.4 Situasi Pembebasan

Berkebalikan dengan situasi penindasan, situasi pembebasan adalah situasi yang dimungkinkan hadir sebagai antitesa terhadap hal tersebut, juga bertujuan untuk mengangkat kesadaran subjek yang ada pada wilayah kesadaran magis dan kesadaran naif, menuju pada kesadaran kritis. Hal ini seolah merupakan aksi yang sedang digawangi oleh Freire guna membuat situasi yang tidak manusiawi menjadi manusiawi. Dalam hal ini, Freire sedang mencoba untuk mentransformasikan kesadaran individu yang tidak diperlakukan sebagai subjek, untuk mampu menjadi subjek untuk dirinya.

Dalam hal ini, situasi pembebasan dilakukan dengan :

1. Pendidikan yang Membebaskan mengandung 2 unsur yakni :
 - a. Pendidikan hadap masalah sebagai langkah awal pembebasan
 - b. Dialog sebagai jalan pembebasan
2. Konsientisasi

Dan untuk lebih jelasnya, akan diuraikan sebagai berikut.

3.4.1 Pendidikan yang Membebaskan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2, bahwa filsafat pendidikan Paulo Freire mengindikasikan proses pembebasan sebagai konsep utama dalam pendidikannya. Hal ini karena pendidikan sejatinya merupakan alat yang mampu membentuk kehidupan yang lebih demokratis. Sementara itu, demokrasi tidak mungkin hadir jika suasana pendukung demokrasi itu tidak ada, yakni kebebasan.

Dalam hal ini, konsepsi yang diusung dalam pendidikan sejatinya berbanding lurus dengan konsepsi yang akan hadir dalam dunia keseharian. Jika proses pembelajaran yang dijalankan dalam pendidikan bersifat otoriter, maka dengan sendirinya kondisi kehidupan yang akan hadirpun akan bersifat otoriter.

Hal ini karena, pola pendidikan dalam kelas, sejatinya mencerminkan pola kehidupan diluar kelas.

Pada sisi inilah, sejatinya pendidikan haruslah menekankan tentang arti penting dari nilai kebebasan, yang kemudian akan memungkinkan proses pembelajaran yang harus dijalani oleh individu dalam kelas sesuai dengan tema kebebasan itu sendiri. Proses pembebasan itu sendiri sejatinya menekankan adanya keterlibatan aktif antar dua subjek, hal ini ditandai dengan diberlakukannya metode pembelajaran yang bersifat dialogis yakni antar dua titik oposan, yakni guru dan murid.

Hal ini kemudian akan mengkristal, dengan lahirnya semangat setiap individu untuk mampu memaknai arti kehadirannya sendiri tanpa ada proses paksaan dengan formulasi penyesuaian diri yang mengikuti alur pokok yang telah ditetapkan melalui kebijakan pendidikan. Pada titik ini, pendidikan yang membebaskan tidak berposisi sebagai pendidikan bercerita, yang menempatkan setiap individu sebagai bejana kosong,⁷⁸ tetap sebaliknya terletak pada usaha ke arah rekonsiliasi dengan menempatkan setiap individu sebagai subjek yang sedang berkontradiksi satu dengan yang lainnya.⁷⁹

Adapun mekanisme yang dilakukan dalam pendidikan yang membebaskan adalah melalui dua tahap yakni :

- a. Melakukan proses pendidikan hadap masalah (problem posing)
- b. Melakukan upaya dialog

dua hal tersebut kemudian akan dijelaskan selanjutnya.

⁷⁸ Paulo Freire. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Diterjemahkan oleh Utama Dananjaya. Jakarta : LP3ES. 2007. hlm 52.

⁷⁹ *Ibid.* hlm 53.

3.4.1.1 Pendidikan Hadap Masalah sebagai Langkah Awal Pembebasan

Pendidikan hadap masalah atau *problem posing education*, sebagaimana dikenal dalam teori pendidikan Freire, adalah sebuah konsep alternatif yang ditawarkan oleh Freire terhadap konsep pendidikan yang sedang berjalan dan terus dimasifkan oleh sistem penindas, yakni pendidikan gaya bank. Pada pendidikan gaya bank, guru adalah sentral, sehingga hubungan antara guru dan murid cenderung bersifat monolog. Guru, memberikan narasi tentang apa saja hal yang dianggap penting bagi peserta didik, dan sebaliknya, peserta didik hanya menerima, memorikan, dan jika perlu mengulang isi dari apa yang dinarasikan oleh guru.⁸⁰

Hal-hal tersebut merupakan dasar dari konsep pendidikan gaya bank. Guru adalah penanam modal dan murid adalah bank yang ditanami modal untuk dapat memberikan kembali investasi bagi sang penanam modal. Sehingga, konsep pengetahuan pun dipahami sebagai sebuah “*gift*” yang diberikan oleh guru.⁸¹ Pada titik inilah, pendidikan gaya bank terlihat stagnan. Karena ketidakmampuannya untuk memberikan daya kritis pada peserta didik untuk membuka mata mereka terhadap pengetahuan, kehidupan sosial, dan dunianya.

Didasari oleh kenyataan itu, Freire melihat bahwa pendidikan gaya bank adalah kepanjangan tangan dari kelompok penindas yang tetap ingin mempertahankan situasi penindasan dan status quo. Dalam hal ini, pendidikan gaya bank akan mampu memberikan kondisi stagnan pada para peserta didik untuk tetap tidak melawan situasi penindasan yang meliputi kehidupan mereka, disamping itu, pada pendidikan gaya bank, terselip kepentingan penindas, yakni mengubah kesadaran kaum tertindas, dan bukan mengubah situasi yang menindas

⁸⁰ Peter Roberts. *Education, Literacy, and Humanization*. London : Bergin & Garvey. 2000. hlm 54

⁸¹ *Ibid.* hlm 54

mereka.⁸² Sehingga, pada titik ini Freire mencoba memberikan alternatif pendidikan, yakni dengan menawarkan konsep pendidikan hadap masalah.

Pendidikan hadap masalah, adalah pendidikan yang mendasari praktek pendidikannya pada intensionalitas dan komunikasi. Hal ini dikarenakan, inti dari pendidikan hadap masalah adalah ciri khas dari kesadaran itu sendiri, yakni : sadar akan. Berbanding lurus dengan konsep pendidikan yang membebaskan, pendidikan hadap masalah menekankan pada tindakan pemahaman (*acts of cognition*). Sehingga dalam prosesnya, objek yang dapat dipahami menghubungkan masing-masing para pelaku pemahaman.⁸³

Pada tahap ini, pendidikan hadap masalah mengubah posisi guru yang dalam pendidikan gaya bank selalau dianggap sentral, menjadi guru yang juga murid. Hal ini dikarekan, pada pendidikan hadap masalah kewenangan guru dihapuskan, dan setiap orang yang terlibat didalamnya memiliki peran dan posisi seimbang, yakni guru yang juga sebagai murid, dan murid yang juga sebagai guru. Posisi ini, telah menghilangkan garis hubungan yang hirarki antagonism guru-murid dengan menjadikannya hubungan yang horizontal.⁸⁴

Bergerak dari hal tersebut, konsep pengetahuan bukan lagi dipahami sebagai sebuah “*gift*”, akan tetapi dipahami sebagai sesuatu yang “*in the making*”, karena hal tersebut selalu dalam proses menjadi, sebagaimana diciptakan oleh guru dan murid dalam memahami realitas dunia. Dari proses pengetahuan yang seperti itu, maka sejatinya, pendidikan hadap masalah sedang berusaha memunculkan kesadaran dan keterlibatan kritisnya terhadap realitas.⁸⁵ Dalam hal ini, pendidikan hadap masalah jelas berbeda dengan pendidikan gaya bank yang

⁸² Paulo Freire. Pendidikan Kaum Tertindas. *Op Cit.* hlm 55.

⁸³ *Ibid.* hlm 64.

⁸⁴ Peter Roberts. *Op cit.* hlm 54.

⁸⁵ *Ibid.* hlm 54.

cenderung membungkam kesadaran dan keterlibatan yang kritis terhadap status dan kondisi yang terjadi dalam realitas.

Pada titik ini, proses pembebasan dimulai. Yakni dengan menekankan pentingnya pikiran yang kritis, investigasi dialogis, dan partisipasi yang dilakukan untuk memahami dunia yang selama ini disembunyikan dan dibungkam oleh model pendidikan gaya bank terhadap setiap peserta didik. Pada tahapan ini, setiap peserta didik mulai berpikir secara holistik dan kontekstual, yang mengindikasikan adanya konsep baru tentang hubungan antara “kesadaran”, “aksi” dan “dunia”. Yang selanjutnya mengantarkan setiap peserta didik untuk berkonfrontasi, bereksplorasi, dan bertindak dengan tujuan yang dinamis dalam merubah dunia.

Sehingga, ketika setiap individu yang belajar terus dihadapkan pada setiap masalah yang berhubungan dengan kehadiran mereka dalam dan bersama dunia, mereka akan semakin ditantang dan berkewajiban menjawab tantangan tersebut, karena setiap masalah memiliki hubungan keterkaitan dengan setiap masalah lain dalam konteks total. Pada posisi ini, setiap individu masuk kedalam hubungan yang dialogis dengan yang lainnya. Setiap peserta didik pun menemukan interaksi dialektis antara kesadaran dan dunia, dimana mereka akhirnya mulai merasakan bahwa ide yang dominan itu bisa dirubah, dan juga bahwa bentuk kehidupan sosial yang menindas pada akhirnya pun bisa ditransformasikan.⁸⁶

Di sinilah arti penting dari pendidikan hadap masalah, ia menekankan akan pentingnya keterlibatan manusia dalam dunianya. Satu keterlibatan berarti memasukan kesadaran untuk ada bersama dunia. Pendidikan hadap masalah cenderung menjadikan setiap individu untuk sadar akan arti keberadaannya dalam dunia. Disamping itu, pendidikan hadap masalah juga mengafirmasi individu untuk menjadi subjek terhadap dirinya sendiri, memberikah harapan tentang dunia mampu dirubah, bergerak dan melihat kedepan.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.* hlm 54-55.

⁸⁷ *Ibid.* hlm 55.

Posisi ini menjadi penting karena dalam tradisi pendidikan yang membebaskan, manusia bukanlah makhluk yang stagnan, berdiri sendiri dan terpisah dari dunianya. Karenanya, pendidikan hadap masalah kemudian menjadi fondasi awal dari kerangka konseptual tentang pendidikan yang hendak membebaskan individu sebagai satuan terkecil dalam dominasi dan hegemoni pendidikan.

Langkah awal inilah yang kemudian mampu memberikan pelayanan terhadap keinginan setiap individu untuk dapat membebaskan dirinya dari kerangka pendidikan yang selama ini mengekang setiap langkah dan kebebasannya dalam situasi dan kondisi yang sengaja dipersiapkan untuk membungkam langkah dan kebebasan tersebut.

3.4.1.2 Dialog sebagai Jalan Pembebasan

Sejalan dengan konsep pembebasan yang sudah diawali dengan pendidikan hadap masalah, maka tahapan selanjutnya dari pendidikan pembebasan adalah terletak pada bagaimana proses pendidikan itu dilakukan. Dalam hal ini, dialog yang memuat komunikasi di dalamnya, mempunyai andil yang penting karena dialog yang dimaksud adalah kata, yang didalamnya terkandung dua dimensi, yakni refleksi dan tindakan. Kerenanya kemudian, dialog dalam hal ini dimaknai sebagai proses perjumpaan antara sesama manusia, dengan perantaraan dunia, dan dalam rangka menamai dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa proses dialog tidak mungkin terjadi antara orang-orang yang hendak menamai dunia dengan orang yang tidak membutuhkan penamaan tersebut atau dengan kata lain, antara mereka yang menolak orang lain untuk mengatakan kata-katanya dengan mereka yang haknya untuk mengatakan kata-kata tidaklah diakui.⁸⁸

Dari kondisi ini, dialog dengan jelas hendak mengantarkan setiap peserta didik untuk memperoleh makna sebagai manusia. Hal ini, karena proses dialog yang terjadi antar setiap individu akan mengantarkan pada keterlibatan dengan

⁸⁸ Paulo Freire. Pendidikan Kaum Tertindas. *Op Cit.* hlm 74-76.

kondisi yang dihadapinya dalam proses penamaan dunia itu. Pada titik ini terlihat, bahwa dialog menuntut adanya komunikasi atau tindakan aktif yang terjadi antar setiap individu agar terlibat dalam proses penamaan tersebut. Proses penamaan ini, mengarah dialog sebagai satu laku penciptaan, yang tidak menghendaki dominasi dan hegemoni terhadap yang lain terjadi didalamnya. Dan jika terjadi dominasi dan hegemoni, maka kedua hal tersebut haruslah terjadi terhadap dunia, dalam kerangka pembebasan manusia.⁸⁹

Pada prosesnya, Freire menyatakan bahwa dialog haruslah ditopang oleh beberapa hal, yakni :

a. Rasa Cinta

Cinta menjadi dasar dari konsepsi dialog dan sekaligus dialog itu sendiri dalam pandangan Freire, karena cinta merupakan tugas wajib bagi para pelaku dialog yang bertanggungjawab. Konsep cinta yang dimaksud bukan hanya terbatas untuk mencintai sesama manusia, tapi juga mencintai dunia. Jika hal ini absen, maka dapat dipastikan dominasi akan muncul dan mengganggu proses dialog. Konsepsi cinta yang dimaksudkan dalam hal ini pun, bukanlah cinta yang bersifat sentimentil, akan tetapi cinta sebagai energi yang mampu melahirkan tindakan-tindakan pembebasan berikutnya.⁹⁰

b. Kerendahan Hati

Kerendahan hati, menjadi penopang selanjutnya dari dialog. Karena dalam dialog yang memungkinkan terjadinya penciptaan konsepsi dunia yang terus-menerus, tidak mungkin lahir dari tingkah laku kesombongan. Ada tahapan ini, Freire menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang mau mendengar kata yang lain jika seseorang itu menganggap remeh yang lainnya. Pada kondisi ini, kesalingberjumpaan seseorang melalui proses dialog tidak akan pernah terjadi. Karena, sikap rendah hati dimungkinkan sebagai penopang konsep dialog dengan

⁸⁹ *Ibid.* hlm 78.

⁹⁰ *Ibid.* hlm 79.

tujuan untuk mencoba secara bersama-sama belajar lebih banyak dari apa yang mereka ketahui sekarang.⁹¹

c. Keyakinan akan Diri Manusia

Hal selanjutnya yang tak kalah penting sebagai penopang dialog, adalah keyakinan mendalam terhadap diri manusia.⁹² Keyakinan ini, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam diri manusia terhadap manusia yang lainnya. Karena akan sangat mustahil jika manusia yang dialogis menolak untuk mempercayai manusia yang lainnya. Hal ini kemudian akan mencegah terjadinya proses dialog yang membutuhkan adanya keterlibatan setiap manusia yang telah saling percaya dan mampu dalam menamai dunia.

d. Harapan

Hal lain yang menopang dialog, adalah harapan. Harapan sejatinya berakar pada ketidaksempurnaan manusia, dan oleh karena itu, ia memungkinkan terjadinya proses pencarian yang terus menerus bersama dengan yang lainnya. Makna harapan dalam hal ini, bukanlah sesuatu yang berpangku tangan dan menunggu, akan tetapi lebih sebagai motor penggerak dari setiap tindakan yang dilakukan. Sehingga jika dialog dilakukan tanpa harapan, maka dialog hanya akan jatuh menjadi kosong dan menjemukan.⁹³

e. Pemikiran Kritis

Akhirnya, dialog yang sejati tidak mungkin terwujud jika tidak melibatkan pemikiran yang kritis. Pemikiran ini melihat realitas sebagai sebuah proses dan perubahan. Dan dalam dialoglah, pemikiran kritis ini menjadi alat pembaca

⁹¹ *Ibid.* hlm 79-80.

⁹² *Ibid.* hlm 81.

⁹³ *Ibid.* hlm 83.

sekaligus perumus konsep perubahan realitas, demi kelanjutan proses humanisasi manusia.⁹⁴

Kelima hal tersebut menjadi dasar dari kerangka dialog yang kemudian akan menjadi langkah selanjutnya dalam proses pendidikan yang membebaskan. Hal ini, mengindikasikan bahwa, dialog memuat didalamnya beberapa aspek yang sejatinya bersangkutan paut dengan kehidupan setiap individu yang mengalami proses penindasan dalam pendidikan. Hal ini, dimungkinkan karena dalam sistem pendidikan yang mendasari dirinya pada konsep pendidikan gaya bank, cenderung akan menolak konsep dialog dalam proses pembelajarannya. Implikasi dari hal ini adalah hilangnya kebebasan yang sejatinya dimiliki oleh setiap individu dalam kaitannya dengan motif eksistensial yang dimiliki individu ketika ia masuk kedalam ruang bernama pendidikan.

Sampai tahap ini, dialog terlihat sebagai jalan yang akan membawa individu menuju kebebasannya dalam pendidikan. Hal ini, karena potensialitas unsur yang terkandung dalam dialog memang menyandarkan dirinya pada realitas dunia keseharian individu-individu yang selama ini ditindas dalam dunia, terlebih-lebih dalam dunia pendidikannya. Sehingga pembebasan dalam pendidikan menjadi sebuah kemungkinan yang pasti terjadi ketika dialog dijadikan jalan menuju pembebasan itu sendiri.

3.4.2 Konsientisasi

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa apa yang dilakukan oleh Freire sejatinya sedang mengangkat kesadaran kritis subjek yang tengah ditenggelamkan oleh sistem pendidikan yang menindas. Pada tahapan ini, Freire dengan konsep pendidikan yang membebaskannya, sedang berusaha untuk memanggil ruang kesadaran kritis, agar dapat hidup dan ada pada setiap individu dalam pendidikan.

Dalam hal ini, Freire mengedepankan individu untuk aktif bertindak dan berpikir sebagai subjek, yang terlibat langsung dalam permasalahan keseharian

⁹⁴ *Ibid.* hlm 84.

yang nyata dan dalam suasana yang dialogis. Proses seperti ini, kemudian akan memunculkan kesadaran seseorang untuk menolak rasa takut akan kemerdekaan atau *fear of freedom*. Dengan cara menolak setiap penguasaan, penjinakan, serta penindasan, maka pendidikan pembebasan Freire secara langsung mengarahkan pada proses penyadaran atau konsientisasi.⁹⁵

Konsientisasi dalam pandangan Freire, merupakan sebuah proses kemanusiaan yang khusus dan eksklusif. Kondisi ini hanya mungkin terjadi pada kondisi manusia yang sadar, bahwa manusia bukan hanya hidup dalam dunia, melainkan bersama dunia, dan bersama orang lain. Hal ini hanya dimungkinkan bagi manusia yang menjadikan dirinya sebagai makhluk 'terbuka', yang kemudian akan menuntun dirinya sendiri untuk dapat melakukan transformasi terhadap dunia secara berkesinambungan, dengan aksi, pemahaman, dan pengungkapan kenyataan dalam bahasa yang kreatif.⁹⁶

Dalam hal inilah, sebenarnya proses konsientisasi itu ada. Konsientisasi dimaksudkan sebagai sebuah proses mewujudkan manusia dengan kesadaran yang lengkap. Pada tahap ini, kesadaran manusia yang ada bersama dunia, dihadirkan dalam proses untuk melengkapi pemahaman manusia dalam kaitannya untuk mengetahui, memahami dan menyadari secara mendalam tentang kenyataan sosiokultural yang membentuk kehidupan manusia, dan kemampuan untuk merubah kenyataan itu.⁹⁷

Proses konsientisasi yang diusung Freire ini, sejatinya hanya ingin menumbuhkan kesadaran dan pemikiran kritis. Dalam tahap ini, Freire berjibaku dengan konsep pendidikan yang diusungnya, yakni dengan menguasai sebuah metode yang dapat menghubungkan pembelajaran dengan pembangkitan kesadaran, agar setiap individu yang terlibat dalam pendidikan berhasil

⁹⁵ Paulo Freire, *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan ReaD. 2002. hlm. Xvii.

⁹⁶ *Ibid.* hlm 123.

⁹⁷ *Ibid.* hlm 166.

menemukan kesadaran kritisnya. Freire menolak masifikasi pendidikan yang hanya menghasilkan kesadaran magis dan naif.

Terkait dengan hal ini, Freire menggolongkan kesadaran manusia pada 3 kondisi kesadaran, yakni kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Kesadaran magis adalah tingkat kesadaran yang tak mampu melihat dan mengetahui keterkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain (kausalitas dalam masyarakat). Pada kondisi yang pertama ini, kesadaran hanya menerima fakta sebagai sesuatu hal yang dikendalikan dan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan “dari atas”. Kondisi ini selanjutnya akan mengakibatkan seseorang menjadi fatalis, karena ketidakmampuannya dalam melihat realitas dan mengakibatkan individu menjadi berpangku tangan, menyerah, dan menganggap mustahil semua usaha untuk mengubah fakta-fakta.⁹⁸

Kondisi yang kedua, yakni kesadaran naif adalah tingkat kesadaran yang melihat aspek manusia sebagai penyebab dari masalah yang terjadi. Dalam bahasa yang lain, Freire menyebutkan bahwa dalam kesadaran naif, kausalitas (hubungan sebab-akibat dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat) dilihat sebagai fakta yang beku dan statis.⁹⁹ Kesadaran seperti ini, menempatkan kreatifitas manusia sebagai penentu perubahan sosial, sehingga dalam hal ini, realitas hanya dilihat dari satu sisi, yakni dari kacamata manusianya saja. Sehingga pendidikan yang tercipta pun, cenderung tetap mempertahankan situasi yang sudah ada.

Sementara itu, kesadaran kritis merupakan antitesa dari dua kesadaran sebelumnya. Yakni dengan melihat bahwa aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Dalam hal ini, kesadaran kritis selalu menganalisa kausalitas sembari mengintegrasikan dirinya dalam realitas.¹⁰⁰ Dalam hal ini pula, kesadaran kritis menghasilkan cara pendekatan baru dengan realitas, yakni pendekatan yang lebih melihat struktur dalam realitas seperti sosial, budaya, politik, ekonomi serta

⁹⁸ Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, *Op. Cit.* hlm 44.

⁹⁹ *Ibid.* hlm 45.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm 46.

ekses yang timbul dari persoalan masyarakat secara mendalam dan kritis. Sehingga model pendidikan yang hadir dalam suasana ini adalah model pendidikan yang memungkinkan setiap individu untuk dapat mengidentifikasi problem yang hadir dalam dunia kesehariannya, serta melakukan analisa tentang bagaimana masalah itu bekerja dan mencari solusi untuk menuntaskannya.

Dalam hal inilah konsientisasi sebenarnya berjalan, yakni dalam penumbuhan kesadaran kritis yang akhirnya mampu membawa setiap individu berpartisipasi terhadap dunia. Disinilah penekanan kesadaran manusia hadir sebagai sesuatu hal yang tak terpisahkan dengan dunianya, karena konsientisasi membutuhkan pengenalan terhadap dunia, bukan dunia yang begitu saja diterima, namun sebagai dunia yang dinamis dalam prosesnya.¹⁰¹

Maka di sinilah arti penting dari pendidikan yang bersandar pada konsientisasi, yakni pendidikan yang bukan menempatkan individu sebagai ruang kosong yang perlu diberikan isi, tapi mampu membawa individu sadar akan kebebasannya yang dirampas melalui pengekangan kesadaran yang menjadikannya naif dan pasif.

3. 5. Masyarakat Terbuka sebagai Hasil dari Situasi Pembebasan

Sebagaimana situasi penindasan yang menghasilkan konsekwensi dengan lahirnya masyarakat yang tertutup, maka demikian pula dengan situasi pembebasan. Situasi pembebasan akhirnya mendorong terciptanya sebuah masyarakat baru yakni masyarakat yang terbuka. Masyarakat terbuka merupakan sebuah konsekwensi logis dari dibukanya ruang dialog dan konsientisasi yang memungkinkan setiap orang untuk terlibat dalam kehidupan dunia.

Masyarakat terbuka, yang tak lain merupakan manifestasi dari tatanan yang demokratis, menempatkan setiap orang dalam kebebasannya untuk berbicara dan bersikap, menjunjung tinggi hak setiap orang dan menjadiahkn dialog sebagai alat dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada yang ditindas dan penindas,

¹⁰¹ Paulo Freire. Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan. *Op. Cit.* hlm 184.

karena semua tindakan ditujukan kearah humanisasi dengan komunikasi aktif yang seimbang untuk tetap menjaga kepentingan kolektif.¹⁰²

Dari sinilah kemungkinan untuk membuat situasi masyarakat menjadi humanis tercipta, yakni karena setiap unsur dalam masyarakat telah mampu mendudukan setiap masalah dengan cara yang dialogis, sehingga unsur dominasi serta hegemoni kemudian bisa diminimalisir dan perlahan dihilangkan. Pendidikan yang mengusung konsepsi seperti ini, sejatinya telah mampu membuka ruang baru. Yakni dengan menempatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara dialogis sebagai konsepsi dasar dari sistem pendidikan yang kemudian berpengaruh pada realitas lainnya.

3.6 Proses Pembebasan Individu dalam Pendidikan

Bersandar pada konsep pendidikan pembebasan yang diajukan oleh Freire, serta potensialitasnya yang akan membawa perubahan, maka dalam hal ini, pendidikan yang membebaskan adalah sebuah tawaran alternatif terhadap konsepsi pendidikan yang sampai detik ini masih menjadi acuan pokok dalam sistem pendidikan di setiap sekolah. Pada posisi ini, proses pendidikan yang ada cenderung untuk mengkebiri setiap tindak dan langkah individu peserta didik jika hal tersebut berimbas pada proses pembelajaran.

Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Freire kemudian harus menjadi sebuah konsepsi pendobrak. Yakni dengan mengedepankan prosesi pembelajaran yang tidak bersifat konvensional dan kaku. Pada tahapan ini, Freire berupaya untuk memberikan sistem pembelajaran atau pendidikan yang mampu membebaskan setiap individu peserta didik dari ruang pendidikan yang bersifat menindas kebebasan mereka.

Freire, melihat bahwa untuk membebaskan individu dalam pendidikan, adalah dengan dua tahap yakni, *pertama*, dengan membawa sistem pendidikan yang baru yang menyandarkan dirinya pada perubahan metode yang selama ini

¹⁰² Mohamad Fuad. *Op. Cit.* hlm 91.

menjadi patokan utama pembelajaran lama, dan dalam hal ini terkandung dua tahap, yakni pertama, merubah pendidikan gaya bank. Pada pendidikan ini, individu hanya menjadi celengan atau bejana kosong yang terus menerus diisi tanpa pernah dibiarkan aktif untuk mencari pengetahuan yang sejatinya hendak dialami oleh individu tersebut. Tahapan ini pula yang mengantar individu terjebak dalam ruang kesadaran naif, yakni kesadaran yang tak mampu membuat individu dapat mengerti setiap proses yang terjadi dibalik semua realitas yang dipelajari olehnya. Sehingga, pada akhirnya individu terjebak dalam situasi dunia yang tak dipahami olehnya. Karenanya keterasingan menjadi jawaban yang sangat logis dari konsepsi pendidikan gaya bank ini.

Pengubahan konsepsi pembelajaran ini, akhirnya dapat menegasikan semua gejala-gejala negatif yang hadir. Perubahan konsep pendidikan gaya bank ini, dimungkinkan sebagai sebuah solusi yang dapat mengatasi situasi-situasi keterasingan yang tercipta dari proses pendidikan yang memisahkan diri dari realitas.

Dalam hal ini, Freire merubah konsep pendidikan tersebut menjadi pendidikan hadap masalah. Yakni pendidikan yang mengorientasikan dirinya pada pemecahan masalah yang dihadapkan pada setiap individu. Dalam hal ini, individu bukanlah manusia yang ditentukan dan ditabungi, akan tetapi menjadi manusia yang menentukan dan mencoba menyelesaikan setiap masalah yang dihadapkan padanya. Pendidikan model ini, menuntut adanya keterlibatan aktif dari individu terhadap realitasnya. Sehingga kesadaran kritis pun lahir sebagai sebuah konsekuensi logis terhadap hal ini, yakni kesadaran yang mampu melihat keterkaitan dalam setiap hal yang membentuk realitas yang ada disekeliling individu itu.

Tahap selanjutnya dari tahap pertama ini, adalah dengan merubah gaya pembelajaran. Dalam pendidikan gaya bank, kecenderungan untuk menjadikan guru sebagai sentral adalah sebuah hal yang lumrah. Sehingga gaya pembelajaran yang dilakukan pun bersifat monolog, yakni dimana segala sesuatu hadir dan terkreasikan dari tangan guru. Pada posisi ini, guru seolah menjadi penentu dari setiap aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Karenanya

otoritarianisme muncul sebagai kondisi yang akhirnya tercipta dari gaya guru mengajar.

Pada posisi ini, keterlibatan aktif setiap individu tidaklah dimungkinkan, karena otoritas pembelajaran hanya datang dari satu sumber, dan dominasi serta hegemoni menjadi hal yang pasti terjadi dalam situasi belajar seperti ini. Ujungnya, alienasi pun kembali hadir dan kukuh sebagai jawaban dari situasi seperti ini.

Maka dalam hal ini, Freire kembali mengajukan perubahan konsep pembelajaran, yakni dengan menekankan arti penting dialog sebagai metode pembelajaran. Metode ini berorientasi melibatkan setiap individu untuk terlibat dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, guru bukan lagi penentu setiap proses yang terjadi dalam belajar, akan tetapi setiap individu memiliki hak untuk turut aktif dalam melibatkan dirinya dalam proses belajar. Selain itu, proses pelibatan ini semakin memperkokoh unsur kesadaran kritis yang telah lahir dari proses pendidikan hadap masalah, yang kemudian diorientasikan untuk dapat merubah dan mengkreasikan kehidupan setiap individu yang dibelenggu dalam realitas melalui sistem pendidikan.

Dialog merupakan sebuah teori tindakan yang menempatkan manusia dalam posisi yang sama, yakni sebagai subjek. Dalam dialog, yang dikedepankan adalah komunikasi, yang juga menjadi hakikat keberadaan manusia. Sehingga, dialog memungkinkan untuk mendukung proyek pembelajaran yang bersifat hadap masalah, karena dialog mampu berposisi sebagai penguat konsep yang memberi jalan dalam proses pemecahan bersama atas situasi dan kondisi yang dialami para peserta didik dalam pendidikan.

Dua hal tersebut di atas, memperlihatkan bagaimana sesungguhnya Freire berusaha memberikan tawaran yang solutif terhadap konsepsi pembelajaran yang hanya menakankan pada kemampuan guru dan cenderung untuk mempertahankan status quo. Dan karenanya, apa yang ditawarkan Freire dalam proses pembebasan individu dalam pendidikan, tentunya merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana konsepsi perubahan social dalam kehidupan manusia dilakukan dalam

kerangka pendidikan bagi mereka yang dialienasikan oleh sistem dan struktur pendidikan.

Tahap *kedua*, adalah dengan membuat proses konsientisasi. Dalam hal ini, subjek ataupun tiap individu dalam pendidikan diajak untuk mampu menemukan kesadaran kritisnya. Hal ini dimulai dengan menanamkan proses pendidikan hadap masalah yang membenturkan tiap individu dengan problem nyata yang bersifat keseharian. Dari hubungan antagonism ini, metode pembelajaran yang dialogis digunakan sebagai penguat prosesnya.

Upaya yang dilakukan secara terus-menerus, yang selalu mulai dan mulai lagi seperti ini, akan membawa seseorang untuk menemukan kesadarannya yang paling dalam, yakni kesadaran kritis, atau kesadaran yang mampu memahami secara mendalam akar permasalahan yang selama ini dihadapi seseorang dalam dunianya, yang tak teruraikan oleh sistem pendidikan yang memasifkan kesadaran.

Dua tahap besar yang dilakukan oleh Freire, mengarahkan pendidikan menuju pada ruang baru, yakni ruang dialektik yang tidak menempatkan kesadaran individu sebagai ruang kosong tak berisi dan tenggelam dalam ketidaksadarannya tersebut, tapi justru sebaliknya. Freire dengan pendidikan pembebasannya hendak menempatkan kesadaran bukan sebagai sebuah ruang kosong, tetapi sebagai ruang utama yang menjadikan manusia kembali sebagai manusia. Disamping itu, pendidikan yang diusung Freire, menempatkan otoritarianisme sebagai musuh yang harus dilawan, karena potensialitas otoritarianis mampu menempatkan individu atau subjek bukan sebagai subjek, tapi menjadikannya sebagai objek dan menegasikan kemanusiaan seseorang.

BAB 4

REPOSISI SUBJEK DALAM PENDIDIKAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN NASIONAL

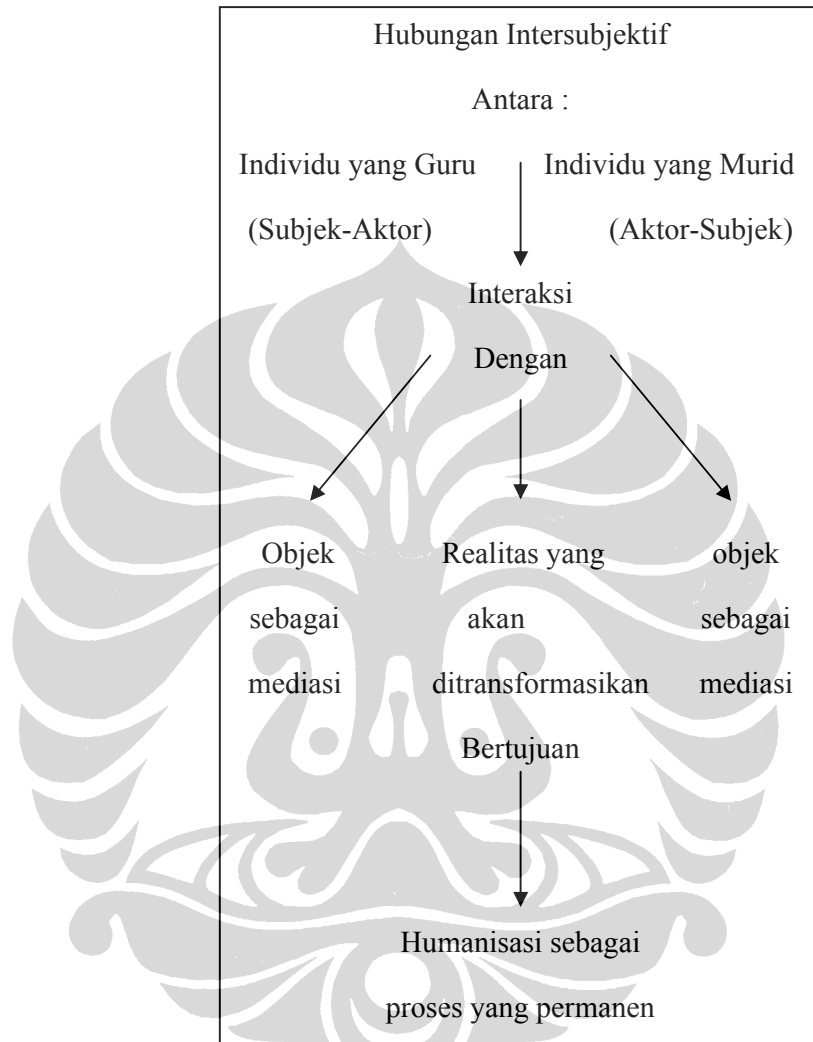
4.1 Reposisi Subjek

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, pendidikan dalam tradisi pemikiran Freire, telah menempatkan individu dalam cara yang berbeda. Dalam hal ini, tradisi pendidikan Freirean telah melakukan sebuah reposisi dalam menempatkan individu sebagai subjek penuh, dengan kesadaran yang juga ada dalam dirinya. Kondisi ini mengakibatkan, sistem pemikiran lama yang menempatkan individu sebagai bejana kosong, harus segera dibuang jauh-jauh. Pandangan yang lama tersebut jelas akan menghambat proses radikalasi konseptual mengenai subjek yang penuh dan berkesadaran. Pada titik ini, reposisi bermaksud untuk mengangkat dan mentransformasikan problematika yang biasanya dihadapi individu dalam pendidikan, yakni indoktrinasi serta ideologisasi yang monolog yang diarahkan pada individu untuk kemudian berubah menjadi ruang belajar yang dialogis.

Reposisi, selain untuk mengubah kerangka dasar penempatan individu dalam pendidikan, akan mengarahkan ruang pendidikan pada wilayah yang lebih luas, yakni pada wilayah yang memungkinkan individu untuk bersentuhan dengan realitasnya yang kompleks. Pada titik ini, reposisi bermakna sebagai pembukaan ruang kesadaran kritis yang menjadi penggerak emansipasi kultural dalam bentuk aksi-aksi kultural. Dengan kata lain, reposisi menghasilkan atau mengembangkan kesadaran kritis yang memanasifasikan tindakan atau aksi. Aksi tersebut memiliki tujuan untuk melestarikan struktur ataupun mengubah struktur tersebut.

Pada kerangka reorientasi ini, hubungan antara guru dan murid terjadi dalam kerangka yang intersubjektif, yakni hubungan yang bersifat timbal balik antarindividu yang ada dalam pendidikan tersebut. Guru sebagai subjek yang juga aktor bertemu dengan murid sebagai aktor yang juga subjek. Pada hubungan ini, terjadi interaksi dengan dunia yang dianggap sebagai objek yang memberikan ruang mediasi dan kemudian mencoba merumuskan realitas objektif kehidupan

mereka itu untuk kemudian ditransformasikan. Tujuan dari transformasi yang dilakukan adalah humanisasi sebagai proses yang permanen. Secara singkat, proses yang dilakukan ini akan tergambar sebagai berikut :



Pada gambar di atas, skema yang dihadirkan dalam proses reposisi berujung dengan hadirnya humanisasi sebagai proses yang permanen.¹⁰³ Rumusan dari kerangka reposisi tersebut dimaksudkan sebagai kerangka dialektik yang memungkinkan humanisasi terumuskan dan selalu dihadirkan sebagai sebuah

¹⁰³ Mohamad Fuad. *Pendidikan sebagai Proses Transformasi Sosial : Telaah Terhadap Filsafat Pendidikan Freire*. Tesis Pada Program Pascasarjana Departemen Filsafat FIB UI. Depok. 2003. hlm 176.

hasil dari dialektika antara guru-murid dengan realitas yang kemudian ditransformasikan dan menghasilkan humanisasi.

Pada titik inilah, reposisi menjadi penting. Hal ini memberikan kepada setiap individu sebuah ruang gerak yang lebih luas. Kesadaran kritis untuk mendialektikkan diri dengan realitas menjadi hal yang wajar, dan karenanya, ruang humanisasi pun, kemudian menjadi sebuah keniscayaan.

Dari kerangka pengembangan tentang reposisi tersebut, maka sejatinya proses demikian akan mengantarkan pendidikan mampu merubah ruang orientasinya. Ruang yang bergerak dari wilayah indokrinasi dan kampanye ideologis, menuju ruang orientasi yang baru yang menjadikan setiap individu merdeka dan mampu mengkespresikan dirinya, kendendaknya serta kebebasannya.

4.2 Reorientasi Pendidikan

Sebagaimana telah disebutkan diatas, reposisi yang berjalan dan coba diterapkan dalam pendidikan akan berimplikasi pada berubahnya ruang orientasi yang selama ini ada dalam pendidikan. Kondisi ini, berjalan karena ketika format penempatan individu dalam pendidikan itu telah berubah, maka ada ruang orientasi yang selama ini hadir karena adanya muatan ideologisasi serta indoktrinasi dalam pendidikan itu, bisa segera berubah. Dari pendidikan yang berorientasi pada ruang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, menuju ruang ekspresi kehendak dan kebebasan diri dari setiap individu dalam proses pendidikan dan kehidupan sosialnya.

Pada kondisi ini, ruang pemahaman yang hadir dari tiap individu yang bersentuhan dengan realitas sudah tak lagi dipatok atau dikukuhkan dan dikontrol oleh muatan indoktrinasi ideologi yang dikembangkan dalam pendidikan.

Pada kondisi ini, ruang orientasi pendidikan yang biasanya diterapkan dalam pendidikan-pendidikan yang konservatif, selalu berujung untuk selalu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan penguasa atau negara. Hal ini sangat lazim, karena memang pendidikan biasanya menjadi titik tumpu dari kerangka

pembangunan negara kedepan. Walhasil, orientasi pendidikan yang dicanangkan, selalu ingin disesuaikan dengan kebutuhan negara, seperti pendidikan harus berorientasi pada lapangan pekerjaan, atau pendidikan harus berorientasi pada penanaman karakter kebangsaan.

Ruang orientasi seperti ini, berujung dengan doktrin politis yang sangat ideologis. Dan dengan doktrin ekonomi yang ada, letak pendidikan berujung pada menghasilkan kerangka pengetahuan serta pemenuhan kebutuhan pengetahuan tiap individu, sebagai instrument yang hanya direduksi bagi kepentingan politis dan ekonomis.

Reorientasi pendidikan dilakukan sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri, yakni konsep pendidikan yang melihat manusia bukan sebagai robot. Tapi melihat manusia sebagai pencipta dan pendukung kebudayaan yang terus-menerus berubah.¹⁰⁴ Pada hal ini memungkinkan manusia, tidak hanya dilihat dalam dimensi politis dan ekonomis belaka, tetapi dalam dimensi kebudayaan yang jauh lebih luas dari dua kerangka dimensi sebelumnya.

Kondisi seperti inilah harus dirubah. Karena, pada konsep pendidikan yang berorientasi pada pekerjaan dan politik kebangsaan, posisi individu diletakan sebagai bejana kosong, yang perlu diisi agar individu itu, bisa hidup sesuai dengan kebutuhan negara. Pada ruang seperti ini, kebutuhan negara selalu berkaitan dengan ruang teknokratik, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, dengan mengabaikan sisi lain dari pendidikan sebagai wahana pengembangan pengetahuan dan wahana pengembangan kedirian.

Wilayah seperti ini, kemudian ternegasikan ketika ruang orientasi pendidikan masih saja berkuat pada orientasi teknokratik. Dari sinilah, titik-tolak orientasi pendidikan kemudian akan bertumpu pada peserta didik atau reposisi individu, sebagai sentral dari kerangka orinetasi pendidikan yang akan berjalan

¹⁰⁴ H.A.R Tilaar. *Manifesto Pendidikan Nasional : Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta : Kompas. 2005. hlm. 276

kemudian. Dalam perkembangannya akan mewujudkan kemerdekaan hidup peserta didik di dalam lingkungan yang semakin luas.¹⁰⁵

Karenanya, reposisi individu dalam pendidikan akan berpengaruh besar pada reorientasi pendidikan. Maka dengan tegas mengisyaratkan sebuah ruang baru, bagi terciptanya pemikiran kritis akan pentingnya ruang baru yang bernama transformasi sosial, yang merupakan sebuah hasil dari dibukanya kran reorientasi dalam menempatkan pendidikan.

4.3 Transformasi Sosial Sebagai Manifestasi Reorientasi Pendidikan

Transformasi, sebagai sebuah hasil yang ingin dicapai dalam pendidikan yang mereorientasikan individu sebagai sentral dari setiap aktivitas pendidikan, tentunya menjadi sebuah keinginan yang menjadi tujuan untuk diimplementasikan. Hal ini berkaitan dengan kondisi sebelumnya yang merefresh individu dalam kerangka ideologisasi, yakni menempatkan individu dalam kerangka penjinakan dan indoknirasi ideologi dari kerangka tujuan negara.

Dalam kondisi ini, biasanya negara yang merefresh individu dalam tujuan ideologisasinya, adalah negara yang otoriter dan berorientasi teknokratis dengan tujuan peningkatan kapital negara, atau biasanya dilakukan dalam kerangka negara otoriter yang sedang berkembang. Paradigma yang digunakan dalam hal ini adalah model paradigma dari W.W. Rostow, yakni model pertumbuhan ekonomi, yang melihat bahwa perkembangan negara selalu diawali dari kerangka tradisional, yang dianggap oleh Rostow, sebagai masalah.¹⁰⁶ Dalam hal ini, Rostow, melihat bahwa perkembangan akan berjalan dengan otomatis melalui akumulasi modal, dengan tekanan dan bantuan hutang luar negeri.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm 276.

¹⁰⁶ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001. hlm. 55.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 56.

Dalam situasi seperti ini, maka negara akan menempatkan pendidikan sebagai instrument pencipta tenaga kerja, yang akan membuat pertumbuhan ekonomi dengan konsep industrialisasi yang dikembangkan oleh negara tersebut. Di sinilah kerangka awal masalah tercipta, yakni refresi ideologis yang dilakukan dalam pendidikan dan sistem sosial yang lainnya, karena harus sejalan dengan konsep yang diajukan dan diterapkan oleh pemerintah.

Pada posisi ini, apa yang terjadi dengan jelas berimplikasi pada penegasian kebebasan individu dalam dunia pendidikan, sehingga ruang ekspresi yang sejatinya mestinya hadir dalam pendidikan hilang. Karenanya, transformasi kemudian menjadi ruang yang niscaya dalam pendidikan yang diusung oleh Freire.

Beranjak dari kata-kata Vladimir Ilyich Lenin, yang menyatakan bahwa “*Tiada tindakan revolusioner, tanpa teori yang revolusioner*”, Freire melangkah dengan membuat karyanya yang berjudul “*Pendidikan Kaum Tertindas*”, yang ia maksudkan sebagai kerangka teoritis dalam merubah situasi penindasan, untuk tidak menindas dan membuka ruang baru, yang bernama transformasi sosial.¹⁰⁸

Transformasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah, sebuah perubahan struktural dan sistemik, yang memungkinkan setiap individu mendapatkan kebebasannya. Dan dalam hal ini, proses transformasi tersebut dilakukan dengan mengubah beberapa kerangka dasar dalam pendidikan yang sudah ada sebelumnya.

Perubahan paradigmatis yang dihadirkan dalam pemikiran Paulo Freire, sejatinya ingin mengembalikan posisi manusia ketempat semula, yakni sebagai individu yang memiliki dirinya sendiri. Pada tahapan ini, transformasi yang dihadirkan dalam kerangka pikir Freire, menghendaki sebuah perubahan yang fundamental pada struktur dan sistem pendidikan yang sedang berjalan, yakni

¹⁰⁸ Mohamad Fuad. *Op. Cit.* hlm : 167.

mentransformasikan dunia dan memanusiakan manusia¹⁰⁹. Konsepsi transformasi demikian dihadirkan Freire, setelah Freire melihat realitas dunia yang dipenuhi dengan manusia fatalis, dan tidak mengetahui keberadaan dirinya sebagai manusia.¹¹⁰

Dalam kondisi inilah, kemudian transformasi menemukan bentuknya, yakni dalam merumuskan pola kehidupan manusia-manusia baru yang kelak akan membangun konsep kehidupan sosialnya. Sebagai contoh, pendidikan yang menerapkan pola dari paradigma yang konservatif hanya akan menghasilkan ruang kesadaran yang bersifat magis atau naif.¹¹¹ Hal ini karena muatan normatifitas dari tradisi yang di indoktrinasikan pada pikiran manusia sebagai makhluk lemah yang tak bisa apa-apa dalam menghadapi problem sosial. Tata pola kehidupan sosialnya, masih saja diatur dan dipertunjukkan oleh para elite yang mempunyai kekuasaan.¹¹²

Berbeda dengan pendidikan yang menerapkan pola kritis didalamnya. Individu diajak untuk terlibat langsung dengan realitas yang dihadapinya.¹¹³ Tata pola kehidupan sosialnya berubah menjadi lebih dinamis dan heterogen. Tidak ada kontrol yang terlalu tinggi dari elite yang mempunyai kekuasaan. Setiap individu peserta didik, telah berhasil menemukan kesadaran kritis dalam melihat ruang sosialnya, dan akhirnya mampu untuk melihat kesalahan sosial dan mampu mewujudkan pola hubungan sosial baru.

Pada kondisi inilah transformasi terwujud, yakni lahirnya kesadaran kritis tentang adanya sebuah sistem dan struktur yang salah dan merefresh keberadaan

¹⁰⁹ Paulo Freire. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan REaD. 2002. hlm. 127.

¹¹⁰ Paulo Freire. *Ibid.* hlm. 95.

¹¹¹ Paulo Freire. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta : PT. Gramedia. 1984. hlm. 44.

¹¹² *Ibid.* hlm. 34.

¹¹³ *Ibid.* hlm. 44.

setiap individu yang diatur dan dikakukan. Ruang kesadaran kritis inilah yang menjadi dasar dari proses transformasi yang kemudian bisa merubah ruang sosial yang ada.

4.4 Relevansi Reposisi Subjek dengan Pendidikan Nasional

Pembahasan subbab ini akan langsung dijelaskan dalam empat subsubbab selanjutnya. Subsubbab tersebut, antara lain gambaran subjek dalam pendidikan nasional, relevansi reposisi terhadap keberadaan subjek dalam pendidikan nasional, dan memaknai ulang sistem pendidikan nasional.

4.4.1 Gambaran Subjek dalam Pendidikan Nasional

Sejalan dengan tema dan konsep yang diusung dalam BAB sebelumnya, yakni tentang proses pembebasan individu yang berkorelasi dengan lahirnya reposisi serta reorientasi pendidikan, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana hal tersebut jika dijalankan dalam kerangka pendidikan nasional. Hal ini karena, jika kita berbicara tentang pendidikan, maka sejatinya kita sedang berbicara tentang keadaan manusia dalam satu lingkup sosialnya.

Lantas bagaimana sebenarnya pendidikan nasional menempatkan peserta didik dalam proses pendidikannya? Pertanyaan tentang hal ini akan membawa kita untuk sedikit mengecek keberadaan subjek dalam kerangka pendidikan nasional yang diatur dalam UU NO.23/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SISDIKNAS. Pada UU tersebut, realitas pendidikan yang diatur adalah realitas pendidikan kontemporer, yang berupaya untuk membangun manusia-manusia Indonesia, pasca reformasi 1998.

Salah satu ayat yang mengandung isi tentang posisi subjek dalam pendidikan adalah pada :

Pasal 1.

Ayat 1

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar *peserta didik* secara aktif mengembangkan potensi...”

Ayat 20

“Pembelajaran adalah proses interaksi *peserta didik* dengan *pendidik* dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar”

Kata peserta didik yang dimaksudkan dalam ayat di atas, berkorelasi dengan konsep subjek dan individu yang dibahas dalam skripsi ini, yakni individu atau subjek yang menjadi peserta didik dalam sebuah sistem pendidikan.

Dalam isi undang-undang tersebut, tersiratkan suatu usaha untuk membuat proses pendidikan yang dinamis, sehingga peserta didik mampu menumbuhkan kreatifitasnya. Pada posisi ini, kerangka pendidikan nasional telah mampu merubah gaya pendidikan yang tadinya hanya bersifat statis, menjadi dinamis. Problem statis dalam pendidikan ini tereduksi karena adanya suatu ikhtiar untuk menegaskan kerangka doktrin ideologisasi yang berorientasi pada pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah.

Akan tetapi, pada pasal lainnya, yakni pada pasal 3, yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan **membentuk watak** serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi *peserta didik* agar menjadi manusia yang... **kreatif, mandiri**, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”

Akan tetapi pada pasal ini, kondisi ideologisasi dan indoktrinasi, terlihat masih ada, yakni dengan penggunaan kata “membentuk watak”, yang berkonotasi dengan proses indoktrinasi serta ideologisasi yang sangat keras. Pada posisi ini, keinginan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi “kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis”, seolah merupakan sebuah tuntutan yang lahir dari keinginan negara, dan bukan dari keinginan individu dalam mengeksplorasi kehendak dan daya kritisnya. Sehingga dapat dipastikan, bahwa kebebasan yang dikehendaki oleh setiap individu dalam pendidikan, akan tetap dikebiri atas nama tujuan membentuk watak dan peradaban bangsa.

Pasal ini jelas memperlihatkan masih adanya masalah dalam kerangka ideal pendidikan nasional, karena dari pasal tersebut, ada tendensi ideologisasi konseptual dari para elite penguasa, untuk menjalankan fungsi ideologisasi dari

ideologi negara yang diamini secara kaku, agar juga diamini oleh setiap individu peserta didik.

Sementara itu, pada pasal 12 ayat 1b, undang-undang ini kembali memberikan posisi yang membingungkan dalam menetapkan posisi subjek, yakni dengan menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1b

“Setiap *peserta didik* berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan **bakat, minat, dan kemampuannya**.”

Pada ayat tersebut, posisi individu sebagai peserta dan subjek pendidikan, terkesan memiliki kebebasan dalam memilih materi pembelajaran yang ingin dikuasai. Kondisi ini dengan tegas menghendaki adanya kebebasan dalam berekspresi dan memahami ruang realitas yang ingin dipahami oleh peserta didik, dan bukan menjadikan individu sebagai bejana kosong yang hanya bisa diisi atas nama keinginan sang pendidik.

Berangkat dari 3 pasal yang disebutkan di atas, maka secara kasar kita dapat memahami, bahwa keberadaan dan posisi individu sebagai peserta didik masih berada dalam posisi yang tidak jelas. Artinya pada satu sisi, peserta didik seolah dibebaskan dan tidak dikontrol, tapi disisi lain kerangka ideologisasi dan indoktrinasi tetap dibakukan sebagai pengontrol dari apa yang ingin dikehendaki oleh negara. Sehingga, bisa dikatakan bahwa posisi subjek dalam pendidikan nasional masih saja dibelenggu atas nama kepentingan ideologi negara.

4.4.2 Relevansi Reposisi Subjek Terhadap Keberadaan Subjek dalam Pendidikan Nasional

Sebagaimana yang telah digambarkan diatas, posisi peserta didik sebagai subjek dan individu dalam pendidikan nasional, masih saja bukan subjek yang mandiri dan otonom. Artinya, keberadaan dan posisi subjek hanya ada dan berkuat dalam lingkaran yang telah ditentukan oleh kebijakan pendidikan negara Indonesia. Kondisi ini, sejatinya masih belum memberikan ruang gerak yang lebih maksimal pada keberadaan subjek yang seharusnya menjadi pemilik dirinya

pribadi, dan juga sebagai orang yang mampu menentukan pilihan-pilihan bagi kehidupannya di dalam dunia pendidikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka reposisi subjek dalam dunia pendidikan nasional, teramat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena, reposisi merupakan sebuah kondisi yang akan dapat memberikan ruang gerak yang lebih pada subjek. Pada tahap ini, ruang kesadaran subjek yang dibelenggu dengan kepentingan ideologisasi dari ideologi negara yang kaku, yakni orientasi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, sejatinya harus dipisahkan jauh-jauh. Kenapa hal ini penting untuk dilakukan, karena dengan membuka ruang reposisi, maka kesadaran subjek tidak lagi berorientasi pada satu titik yang telah dibakukan, akan tetapi akan tersebar ke beberapa titik-titik baru yang selama ini tidak dibakukan sebagai tujuan utama pendidikan.

Pendidikan, perlu dipahami bukan sebagai instrument penanaman dan pembentuk karakter, pemberi, pencari dan penghasil nafkah serta penumbuh stabilitas ekonomi dan politik saja. Akan tetapi lebih luas dari itu, yakni sebagai wahana kebudayaan yang kreatif, dinamis, bahkan progresif. Pada titik ini, hal utama yang akan muncul dalam suasana pendidikan adalah membangun kesadaran kritis. Kesadaran tersebut, akan mampu membimbing peserta didik untuk mampu menjadi manusia yang berakal. Kondisi seperti ini, sejatinya telah mengantarkan setiap individu untuk berpikir dan menganalisa problem-problem yang dihadapinya dalam realitas pendidikan untuk kemudian ditransformasikan menjadi analisa dalam dunia kesehariannya. Hal semacam ini, dinilai penting karena akan membawa dampak yang jauh lebih bermanfaat dibanding dengan menerapkan konsepsi pendidikan yang hanya menumbuhkan kesadaran tentang jati diri kebangsaan, dan pertumbuhan ekonomi belaka.

Di sisi lain, konsep pendidikan yang seperti ini yakni konsep reposisi yang bersandar pada konsep pendidikan yang membebaskan, menghendaki adanya pikiran yang jernih dalam menempatkan manusia sebagai manusia. Kondisi pemahaman tentang penghargaan akan manusia dalam pendidikan masih terasa sebagai utopia dan belum terlaksana, sehingga ruang untuk menghargai keberadaan manusia menjadi sangat penting. Karenanya, kemudian pemahaman

tentang manusia yang dilihat sebagai manusia itu penting, yakni dengan menghargai keberadaan individu dalam batas kebebasan dan kehendak yang ingin dipilih dan dijalani olehnya. Dari rumusan seperti ini, maka seharusnya pendidikan yang menghargai posisi individu sebagai manusia utuh, harus mampu mengakomodir semua bentuk keinginan dan kehendak dengan membuka macam-macam alternatif dalam dunia pendidikan.

Akan tetapi, kondisi yang terjadi masih saja berbeda dengan apa yang diidealkan. Pemahaman akan manusia sebagai manusia, masih saja belum bisa diresapi secara benar. Buktinya dengan kurang mampunya sekolah dalam memberikan alternatif dan ruang gerak yang lebih maksimum pada keberadaan peserta didik dalam pendidikan

Posisi-posisi seperti inilah yang menyudutkan subjek dalam pendidikan kita. Mereka masih saja tak bisa berkeinginan, ketika keinginan untuk membuat dirinya sebagai manusia utuh yang berkehendak, masih saja dikungkung oleh seberkas doktrin moral, ideologi dan kepentingan yang dibakukan secara kaku melalui sistem pendidikan atau kurikulum. Sehingga, konsepsi ini, akhirnya menuntun pada pertanyaan yang kemudian muncul yakni, apakah benar kebebasan dan posisi subjek yang mandiri serta otonom sudah mampu diimplementasikan dalam dunia pendidikan Indonesia?

4.4.2.1 Memaknai Ulang Kurikulum

Beranjak dari pertanyaan tersebut, jawaban yang ternyata ada adalah belum. Pendidikan yang ada, masih saja berpatokan pada pola lama, walaupun sudah mengganti sistem satuan kurikulum yang ada dari KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran.

Dalam perubahan kurikulum ini sendiri, konsep pendidikan yang ada masih saja bertumpu pada “*teacher centre*”, artinya, guru masih saja menjadi basis dari proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dalam kondisi seperti ini, dengan jelas memperlihatkan bahwa kurikulum yang ada, masih belum mampu menjadikan individu peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran atau

yang umumnya disebut dengan “*student centre*”. Karenanya, posisi peserta didik sebagai subjek yang diidealkan masih saja berada dalam posisi subordinatif, artinya, dalam hal ini masih terjadi hegemoni ideologis dari sang pengajar atau guru terhadap yang diajar atau peserta didik, sehingga kesadaran kritis yang diharapkan hadir dengan sendirinya dalam diri individu peserta didik, terganjal oleh indoktrinasi pengetahuan dan nilai, yang dilakukan melalui praktek ideologisasi pendidik dalam proses belajarnya.

Permasalahan tentang posisi subjek ini, terlihat sangat nampak dengan menempatkan kurikulum sebagai patokan utama pembelajaran, yang walaupun ‘fleksibilitas’ dari perubahan kurikulum tersebut sudah diharapkan hadir. Permasalahan ini, seolah bukan permasalahan yang berarti, karena sebagian kelompok menganggap bahwa kurikulum yang ada sekarang ini sudah fleksibel. Akan tetapi, fleksibilitas kurikulum adalah sebuah hal yang masih saja kaku. Mengingat, kurikulum yang ada masih saja menjadi sumber utama, dan bukan keberadaan kehendak subjek atau peserta didiklah yang menjadi patokan.

Pada tahapan inilah, kurikulum menjadi momok yang masih menghantui kehendak dan kebebasan individu dalam menjalankan proses pembelajarannya. Sehingga, dari hal ini, kurikulum seharusnya bukan menjadi tanggungjawab dari pemerintah, akan tetapi disandarkan pada kehendak individu yang melakukan kesepakatan secara komunal bersama individu-individu lainnya, dalam memulai dan melakukan proses pembelajarannya.

Sisi lain, dari proses memaknai ulang terhadap kurikulum ini adalah karena kurikulum tidak dihadirkan dari perspektif yang bersandar pada kondisi real yang dialami oleh setiap individu. Kurikulum selalu disuntikkan oleh mereka yang dianggap lebih tahu dari individu. Karenanya, sekolah yang kemudian menjadi tempat realisasi dari kurikulum, berubah menjadi rumah yang bisa membengkokkan kesadaran individu dalam mempelajari, memahami dan menghadapi realitas yang dialami oleh individu.

Sehingga dari kondisi tersebut, bisa dipastikan bahwa reposisi akan mampu menghasilkan kondisi yang dapat menghargai posisi individu dalam

proses pembelajarannya, dengan memaknai ulang konsep kurikulum yang selama ini dijadikan patokan dalam sistem pendidikan nasional.

4.4.2.2 Memaknai Ulang Ujian Nasional

Sisi lain dari reposisi yang akan dihadirkan dan berkaitan dalam menempatkan posisi individu dalam pendidikan nasional, adalah memaknai ulang sistem Ujian Nasional. Hal ini menjadi penting karena pendidikan bukanlah sebuah proses menabung seperti yang dikatakan oleh Freire. Pendidikan bukanlah sebuah proses penanaman pengetahuan pada individu untuk kemudian diambil untungnya atau bunganya melalui proses ujian.¹¹⁴

Penempatan individu dalam kerangka ujian, membuat beberapa aspek dalam pendidikan hilang. Salah satunya adalah, relevansi pengetahuan yang harusnya berkorelasi dengan realitas, menjadi terbengkokkan dengan memposisikan pengetahuan berada pada menara gading. Pada posisi ini, pengetahuan tidak bersinegri dengan kondisi keseharian, karena pengetahuan yang didapat merupakan pengetahuan yang terpisah dari lingkungan sosial dan cenderung berbau teori yang berseberangan dengan realitas. Pada ujian, setiap individu dipaksakan mengeluarkan sebagian teori yang telah diajarkan dan hanya sedikit berkorelasi dengan realitasnya. Pengetahuan diposisikan sebagai investasi dengan bunga yang melimpah, tanpa pernah diketahui pertautan antara pengetahuan dengan implikasi logis dan *realnya* dalam realitas kehidupan individu.

Selain itu, ada problem hak yang sifatnya dasariah yakni kebebasan yang dinegasikan dalam Ujian Nasional. Karena kemudian Ujian Nasional dijadikan instrument satu-satunya yang bisa memberikan penilaian pada kelulusan individu dalam proses pembelajarannya. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa ujian hanya sebuah kegiatan yang bersifat ritual tahunan, artinya Ujian Nasional diselenggarakan sebagai sebuah ‘upacara adat’ dari kebiasaan konsepsi

¹¹⁴ Paulo Freire. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta : LP3ES. 2008. hlm. 52.

pendidikan lama atau pendidikan gaya bank, yang menyandarkan pengetahuan sebagai investasi dengan bunga yang berlebih.

Selain itu, di sisi lain Ujian Nasional tak mampu untuk melatih serta mengembangkan daya pikir dan kemampuan ekspresi, bahkan cenderung membonsai perkembangan ilmu dan daya nalar peserta didik.¹¹⁵ Dalam kondisi inilah penempatan terhadap pengetahuan sebagai barang simpanan berkembang. Dan ujian menjadi sebuah mekanisme yang bersifat sistematis dalam menentukan kelulusan, yang kemudian mengkebiri kebebasan individu dalam menjalani proses pembelajaran sebagai sebuah kreasi eksistensial, yang kemudian akan dimanifestasikan dalam kehidupan kesehariannya.

Selain itu, pengetahuan yang didapatkan individu dalam ruang kelasnya, tidak menjangkau pada kondisi lingkungannya. Pengetahuan yang ada hanya sebatas pengetahuan bersifat teknis dan teknokratik yang tidak memberikan kebaruan pemikiran pada individu untuk mampu menganalisa problem sosial yang ada dalam kehidupannya.

Ekses selanjutnya yang merugikan dari Ujian Nasional adalah lahirnya tekanan psikologis pada individu. Setiap individu peserta didik akan mengalami kekhawatiran yang mendalam, hal ini karena Ujian Nasional dipersepsi sebagai sebuah peristiwa yang bukan mengukur kemampuan tetapi suatu saringan menyisihkan dan memilih.¹¹⁶ Bagi individu yang mendapatkan nilai bagus, mereka terpilih untuk masuk ke jenjang lain yang lebih prestisius, sementara yang tersingkir, harus menanggung malu karena tak bisa masuk ke jenjang lain yang lebih prestisius.

Karenanya, kondisi-kondisi yang telah dituliskan diatas, menjadi alasan yang logis dari pemaksaan ulang terhadap penempatan Ujian Nasional sebagai

¹¹⁵ Utomo Danan Jaya, *Sekolah Gratis : Esai-esai Pendidikan yang Membebaskan*. Jakarta : Paramadina. 2005. hlm 258.

¹¹⁶ *Ibid.* hlm 271.

standarisasi dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan terhadap individu dalam proses pendidikan.

Ujung dari semua hal itu adalah pengetahuan yang didapat individu dalam proses pendidikan, akhirnya kurang mampu membawa individu untuk mampu mentransformasikan ilmu dan pengetahuan yang didapatnya dalam lingkungan sosial. Sehingga basis benturan antara pengetahuan dan realitas semakin nampak, dan akhirnya tak mampu memberi solusi bagi kehidupan individu dalam kehidupannya kedepan.

4.4.3 Memaknai Ulang Sistem Pendidikan Nasional

Seperti yang telah dijelaskan diatas, konsep yang diusung dalam skripsi ini adalah sebuah kritik dan masukan bagi penempatan individu dalam proses pendidikan yang kemudian akan berimplikasi pada kehidupan sosialnya.

Pada kondisi ini, pendidikan adalah sebuah wahana kebudayaan yang mampu menempatkan posisi individu sebagai penggerak dan pendorong perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupannya. Posisi manusia sebagai individu adalah sebuah kondisi penting, mengingat manusia bukanlah sebuah barang atau robot yang bisa diperlakukan seenaknya. Penempatan manusia sebagai individu bermakna sebagai penempatan manusia sebagai manusia, yang memiliki kehendak, kebebasan, kesadaran, dan pikiran.

Akan tetapi, realitas pendidikan masih belum mampu melihat kondisi ini, sehingga, individu tidak pernah dihargai keberadaanya. Pada kondisi yang demikianlah, posisi individu yang menghendaki kebebasannya dalam proses kehidupannya, selalu ternegasikan oleh kepentingan-kepentingan negara.

Dari kondisi yang demikian, pendidikan menjadi semacam instrument politik dan kekuasaan. Yang hendak mengarahkan tiap orang untuk tetap menjadi warga yang patuh serta penurut di berbagai aspek kehidupan yang ada. Sehingga kondisi inilah yang sejatinya harus ditafsir ulang. Pendidikan nasional yang menghendaki pembentukan watak kebangsaan dan keIndonesiaan, perlu dipahami

kembali dan ditafsirkan kembali dari kerangka kekinian, yakni dari kerangka pikir yang jauh lebih kritis dan lebih aktual.

Pemahaman tentang perlunya reinterpretasi, reposisi dan redefinisi tentang individu sebagai subjek dalam pendidikan, penting sekali adanya. Karena individu bukanlah manusia yang hadir dengan ketidaktahuan, kepolosan serta kekosongan. Individu adalah manusia utuh, manusia yang mengetahui, manusia yang berkesadaran. Konstruksi pikiran yang demikianlah yang seharusnya ada dalam kerangka pendidikan nasional. Setiap individu diposisikan sebagai manusia yang sudah memiliki kehendak dan pengetahuan serta kesadaran. Sehingga pendidikan yang akan hadir, adalah pendidikan yang kemudian mampu mempertegas kehendak, pengetahuan, serta kesadaran individu untuk menjadi lebih bebas, mendalam, kritis dan dinamis. Di sinilah arti penting pendidikan, yakni menjadikan manusia sebagai pelopor dari aksi-aksi kultural yang berkorelasi dengan transformasi sosial dan budaya.

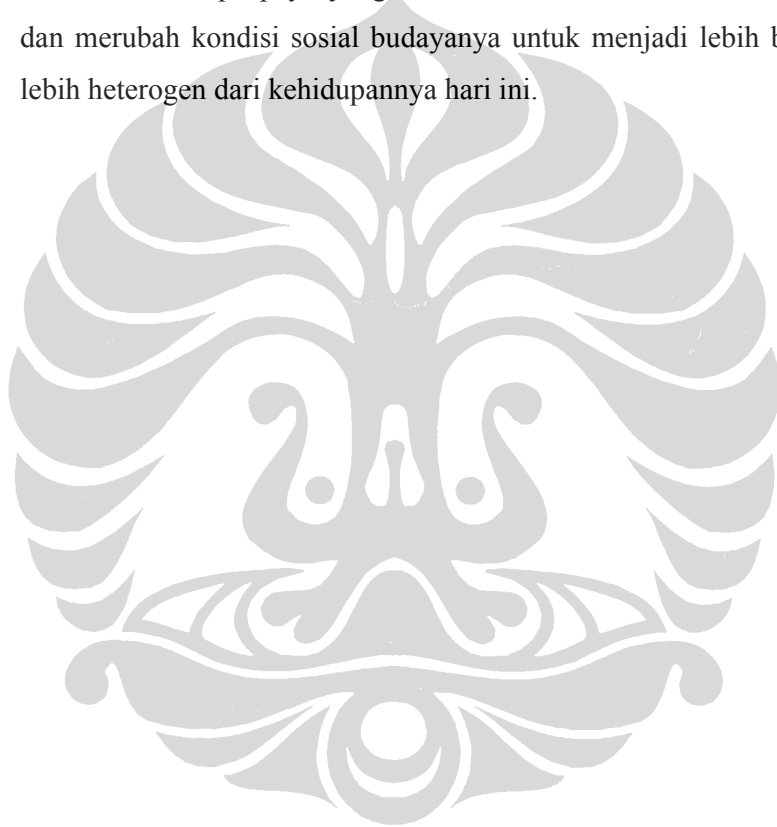
Selain itu, penempatan ujian dalam sebagai instrument pemberi legalitas, terasa amat menegaskan bahwa pendidikan hanya sebagai indikator statistik dari naik-turunnya keberhasilan negara dalam membina dan menerapkan kebijakan kenegaraannya. Dalam hal ini, pendidikan nasional tidak mampu melihat pendidikan sebagai indikator dari lahirnya kemandirian individu dalam membangun kehidupan sosialnya, tetapi menjadi alat untuk memperteguh kemandirian dan ketergantungan individu pada negara.

Reposisi yang dilakukan dalam pendidikan nasional, juga diharapkan mampu membawa individu pada posisi yang sejati, yakni sebagai pembuka ruang-ruang sosial yang baru. Karena pendidikan bukanlah pengukuh koordinat manusia dalam kehidupannya, tetapi membuat manusia untuk dapat membentuk dan mengkreasikan koordinat sosial, yang akan membawa manusia semakin bersentuhan dengan realitas dan mengetahui problem realitas kebudayaan, politik, sosial dan ekonomi.

Dari pemaknaan seperti inilah, pembahasan tentang individu sebagai subjek diharapkan mampu membawa dampak pada realitas pendidikan nasional.

Selama ini masih terdengar keliru dalam menilai, menempatkan dan menghargai posisi kemanusiaan manusia. Menjadi lumrah jika pada akhirnya, konflik, ketidakpuasaan, kebodohan dan kecurigaaan yang bersifat negatif, selalu hadir dalam ruang sosial manusia Indonesia, selama pendidikan yang diterapkan tidak mampu menempatkan individu sebagai manusia sejati yang utuh dengan kehendak, kebebasan, dan pikiran yang dimilikinya.

Sehingga kemudian, dari titik inilah pendidikan diharapkan bisa menjadi motor dari setiap upaya yang dilakukan individu dalam memaknai menganalisa dan merubah kondisi sosial budayanya untuk menjadi lebih baik, lebih dinamis, lebih heterogen dari kehidupannya hari ini.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pendidikan, pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan yang primer. Sebuah kebutuhan yang mesti dan harus didapatkan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Manusia, tentunya merupakan makhluk utama yang berhak memperoleh pendidikan. Bagaimana tidak, manusia adalah pengemban dan pengkreasi utama di dalam kehidupan ini. Mendapatkan pendidikan, tentunya merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi kewajiban yang dimaksudkan bukanlah sebuah pengikatan yang bersifat kaku serta mengikat, namun sebaliknya, yakni kewajiban yang memberikan ruang yang bebas bagi ekspresi identitas diri, kebebasan, serta kehendak yang dimiliki oleh manusia.

Kondisi ini merupakan sebuah kondisi yang alamiah, karena manusia ditakdirkan untuk hidup dalam sebuah realitas dunia dengan semua potensi dan lingkungan yang ada disekelilingnya. Tugas manusia untuk dapat menciptakan peradaban dan mengkreasikan ruang-ruang peradaban, merupakan sebuah bukti bahwa manusia ditaksirkan memiliki akal budi. Akal budi yang dimiliki oleh manusia inilah, yang diharapkan mampu membawa manusia berproses dari kondisi yang bisa menjadi luar biasa. Begitu pun dengan kehendak yang dimiliki manusia. kehendak menuntun manusia untuk dapat menyuntikan semangat dalam memberi warna pada kehidupannya, dan ekspresi, tentunya merupakan bagian inti yang mengantarkan manusia akhirnya menegaskan keberadaannya dengan bentukan-bentukan kreasi dari akal budi dan kehendaknya.

Di sisi lain, pendidikan merupakan sebuah wahana kebudayaan. Wahana yang dapat memfasilitasi manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan mengkreasikan pengetahuan. Hakikat pendidikan adalah untuk membuat manusia semakin dewasa, dan juga sebagai wahana tempat manusia berproses menjadi dan menentukan dirinya sebagai pribadi dan individu. Pendidikan ada untuk membuat manusia tahu, mengerti dan paham akan kondisinya sebagai manusia. Dari proses

yang demikian, pendidikan menjadi sebuah tempat manusia merumuskan tujuan dan keinginan yang ingin dicapai dan diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Apabila pendidikan dipahami dari kerangka tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pendidikan adalah wahana tempat lahirnya kebebasan, kehendak dan ekspresi. Pendidikan seperti inilah yang kemudian disebut sebagai pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang mampu menempatkan manusia sebagai *faber mundi*, yang mengiring manusia untuk terlibat aktif dengan dunia dan realitasnya. Pendidikan yang mampu membuka horizon penglihatan, pemahaman, dan pikiran manusia tentang dunia yang ditempatinya.

Akan tetapi, permasalahan tentang penempatan manusia dalam pendidikan kemudian lahir. Yakni ketika pendidikan telah masuk kedalam wilayah institusi negara yang kaku. Pada posisi ini, pendidikan kemudian disesuaikan dengan kebijakan negara yang juga kaku, sehingga kemudian menempatkan pendidikan sebagai sebuah alat yang akan menjadi mesin, tempat ideologisasi dan indoktrinasi tentang watak dan karakter negara dilakukan. Pendidikan pun, kemudian kehilangan spiritnya sebagai wahana kebudayaan.

Di sinilah awal pendidikan menjadi tempat yang juga menjadi musuh bagi individu. Pendidikan, sudah lupa pada hakikat awalnya, yakni menjadikan manusia menjadi dewasa serta sebagai tempat manusia untuk berproses menjadi dan menentukan dirinya sebagai individu.

Pada taraf inilah, Freire melihat bahwa ketika pendidikan tetap dilakukan dengan semangat refleksifitas yang tiranik, melalui ideologisasi dan indoktrinasi, maka keberadaan pendidikan sebagai wahana kebudayaan yang aktif dan kritis ternegasikan oleh kepentingan ideologisasi dari negara. Watak ideologisasi dalam pendidikan yang dilakukan oleh negara, kemudian menegasikan hubungan antara manusia sebagai individu dengan realitas sebagai tempat individu belajar. Pendidikan direduksi hanya demi kepentingan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Walhasil, pendidikan kehilangan kesejatiannya sebagai wahana pemberi pengetahuan, dan malah menjadi tempat untuk menghasilkan para tenaga kerja serta kaum teknokratis, yang akan memberi banyak keuntungan ekonomis.

Dalam kondisi yang demikian, posisi individu sebagai peserta didik, tidak lebih dari sebuah barang belum jadi, yang kemudian dibentuk dan disesuaikan kegunaanya demi kepentingan negara. Dalam hal ini, pendidikan kemudian menjadi mesin pengolah yang tidak ada bedanya dengan pabrik-pabrik pembuat barang.

Kondisi ini, dengan jelas memperlihatkan bagaimana pendidikan bukan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pengetahuan bagi para peserta didiknya, akan tetapi menjadi mesin pencipta peserta didik sebagai barang yang akan digunakan jasanya demi kepentingan negara. Hal ini, memperlihatkan bahwa pendidikan bukanlah wahana tempat individu belajar untuk menjadi pribadi yang mampu menentukan kehendaknya dan kebebasannya, tetapi menjadi wahana perusak kepribadian individu, karena malah mengatarkan individu untuk tidak bersentuhan dengan realitasnya.

Dari kondisi yang demikian, pendidikan kemudian perlu mengalami perubahan. Yakni dengan merubah konsepsi penempatan individu bukan lagi sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek, dalam proses pembelajarannya. Perubahan konsepsi dalam memandang individu ini, yang kemudian disebut reposisi. Reposisi dimaksudkan untuk menempatkan individu sebagai subjek bebas yang otonom serta diposisikan sebagai manusia utuh, yang berkendak dan berkesadaran. Reposisi, dimungkin sebagai sebuah konsepsi yang akan menempatkan manusia sebagai manusia, juga mampu menempatkan manusia untuk dapat bersentuhan langsung dengan realitasnya. Hal ini dimungkinkan, karena dengan menempatkan individu sebagai subjek, maka individu akan merubah posisi awalnya yang hanya menerima pengetahuan menjadi pencari pengetahuan. Di sisi inilah, persentuhan dengan realitas kemudian hadir sebagai konsekuensi logis dari pencarian pengetahuan.

Di sisi lain, reposisi yang dilakukan dalam pendidikan akan mnegiring orientasi baru dalam pendidikan. Orientasi lama yang hanya bergerak di wilayah stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, dengan sendirinya akan berubah menjadi orientasi pada penumbuhan kesadaran kritis yang akan membawa individu untuk menghadirkan transformasi sosial dalam lingkungan

kehidupannya. Hal ini karena, dengan semakin seringnya individu bersentuhan dengan realitasnya, individu akan bersentuhan langsung dengan kondisi realitas yang dialaminya. Hal demikian menjadi sangat wajar, karena ketika individu bersentuhan dengan realitas, individu pasti menemukan problem-problem yang menghambatnya. Penuntasan problem itu, kemudian akan membawa individu untuk lebih dewasa dan menjadi pribadi yang dapat menentukan kepribadiannya.

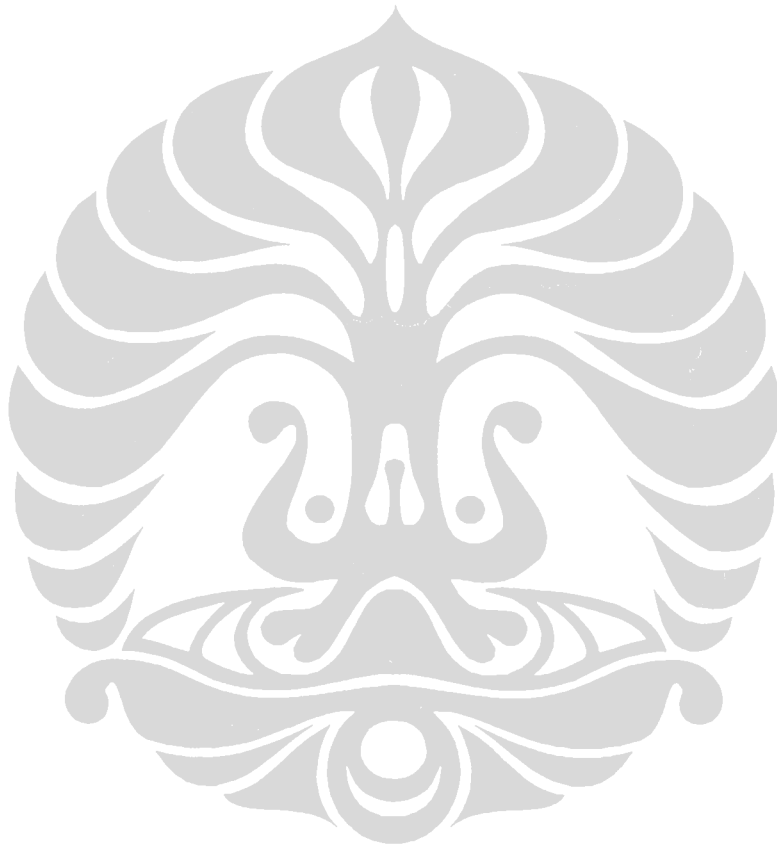
5.2 Saran

Sebagaimana kesimpulan yang telah ditulis di atas, maka saran yang ingin diajukan adalah perlunya pemikiran Freire ini, untuk diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional. Disamping itu, pemikiran Freire ini, akan berimplikasi pada penantaaan baru dalam sistem pendidikan nasional. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB 4, pendidikan nasional masih saja belum mampu menenmpatkan individu sebagai subjek yang berkesadaran, dan berkehendak. Jika hal ini tetap saja dilaksanakan, maka pendidikan masih saja berkutat pada wilayahnya sebagai mesin ideologisasi yang mematikan keberadaan individu sebagai subjek.

Perubahan kurikulum yang dilakukan, masih saja tak mampu mengakomodir keberadaan individu sebagai subjek. Hal ini kemudian akan dipastikan dapat membuat pendidikan nasional tidak lebih sebagai sebuah prosesi atau ritual pemerintah agar dianggap peduli pada warga negaranya. Kondisi yang demikian sangatlah mengkhawatirkan, karena jika hal ini tetap dilaksanakan, maka pribadi-pribadi yang terbentuk adalah pribadi yang tidak utuh. Artinya setiap individu yang hadir dari pendidikan nasional merupakan individu yang tak berkesadaran, karena mereka hanya barang yang diciptakan dari sebuah proses pembuatan barang siap pakai.

Disamping itu, sebagaimana yang telah dilakukan Freire, bahwa pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dari ranah politik, mengingatkan pada kita bahwa pendidikan harus disatukan dengan politik. Hal ini, tidak bermakna bahwa pendidikan menjadi alat ideologisasi politik, tetapi pendidikan dijadikan sebagai

alat kontrol terhadap kondisi politik serta kekuasaan yang sedang berlangsung dalam sebuah kehidupan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Utama :

- Freire, Paulo. 1970. *Pedagogy of The Oppressed*. New York : Seabury Press.
- , 1984. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta : Gramedia.
- , 1998. *Pedagogy of Freedom : Ethics, Democracy, and Civic
Courage*. Lanham, Md : Rowman and Littlefield.
- , 2002. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan
Pembebasan*. Yogyakarta : REaD dan Pustaka Pelajar.
- , 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta : LP3ES

Buku-buku Penunjang:

- Abidin, Zainal. 2002. *Filsafat Manusia : Memahami Manusia Melalui Filsafat*.
Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Althusser, Louis. 2007. *Filsafat sebagai Senjata Revolusi*.
Yogyakarta : Resist Book.
- , 2004. *Tentang Ideologi*, Yogyakarta : Jalasutra.
- Balibar, Etienne. 2007. *The Philosophy of Marx*. London & New York : Verso.
- Collins, Denis. 2002. *Paulo Freire : Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gahral Adian, Donny. 2006. *Percik Pemikiran Kontemporer : Sebuah Pengantar
Komprehensif*. Yogyakarta : Jalasutra.

Hassan. Fuad. 1973. *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*. Jakarta : Pustaka Jaya.

Intan Naomi, Omi (Peny). 2001. *Menggugat Pendidikan*.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mclaren, Peter., and Peter Leonard (ed). 1993. *Paulo Freire : a Critical Encounter*. London & New York : Routledge.

Roberts, Peter. 2000. *Education, Literacy and Humanization : Exploring the Work of Paulo Freire*. London : Bergin & Garvey.

Russell, Betrand. 2004. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Santoso, Lystiono (Ed). 2003. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Strinati, Dominic. 2003. *An Introduction To Theories Of Popular Culture*.

London & New York : Routledge.

Sugiharto, Bambang (ed). 2008. *Humanisme dan Humaniora : Relevansinya Bagi Pendidikan*. Yogyakarta : Jalasutra.

Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional : Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta : Kompas.

Karya-Karya yang Tidak Diterbitkan :

Agus Nugroho, Aloysius. 1982. *Tetapan-tetapan Antropologis dalam Filsafat Pendidikan Paulo Freire*, Skripsi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Jakarta.

Fuad, Mohamad. 2003. *Pendidikan sebagai Proses Transformasi Sosial : Telaah Terhadap Filsafat Pendidikan Freire*. Tesis Pada Program Pascasarjana Departemen Filsafat FIB UI. Depok.

Internet :

Purwanti, B I. 2005. *Pendidikan dan Kolektivitas Untuk Bumiputera* dalam milis diskusipembebasan@yahoo.com, diakses Januari 2005.

Pendidikan Humanis, makalah tanpa nama pengarang dalam milis diskusipembebasan@yahoo.com, diakses pada tanggal 06 februari 2005

Majalah :

Basis No 03-04/Tahun 2002, edisi Teologi Pembebasan.

